

**EFEKTIVITAS POLA DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN  
NON TUNAI MELALUI E-WARONG DI DESA TAMBONG  
KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**FAHRINA AMALIA**  
**NIM : E20172184**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M**  
**NIP. 19660322 199303 1 002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2021**

**EFEKTIVITAS POLA DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN  
NON TUNAI MELALUI E-WARONG DI DESA TAMBONG  
KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**FAHRINA AMALIA**

**NIM : E20172184**

**Disetujui Pembimbing**

**Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M**  
**NIP. 19660322 199303 1 002**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**EFEKTIVITAS POLA DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN  
NON TUNAI MELALUI E-WARONG DI DESA TAMBONG  
KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Rabu  
Tanggal: 15 Desember 2021

**Tim Penguji**

Ketua



M. F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I  
NIP. 19760812200801 1 015

Sekretaris



Siti Indah Purwaning Yuwana, S. Si., M.M  
NIP. 198509152019032005

Anggota:

1. Dr. Nikmatul Masruroh, M.EI
2. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



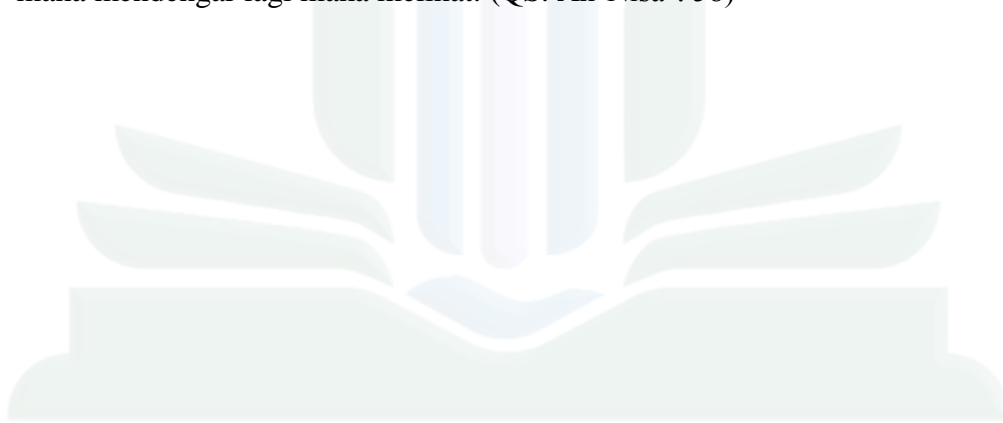
  
Dr. Johandan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (QS. An-Nisa': 58)



# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

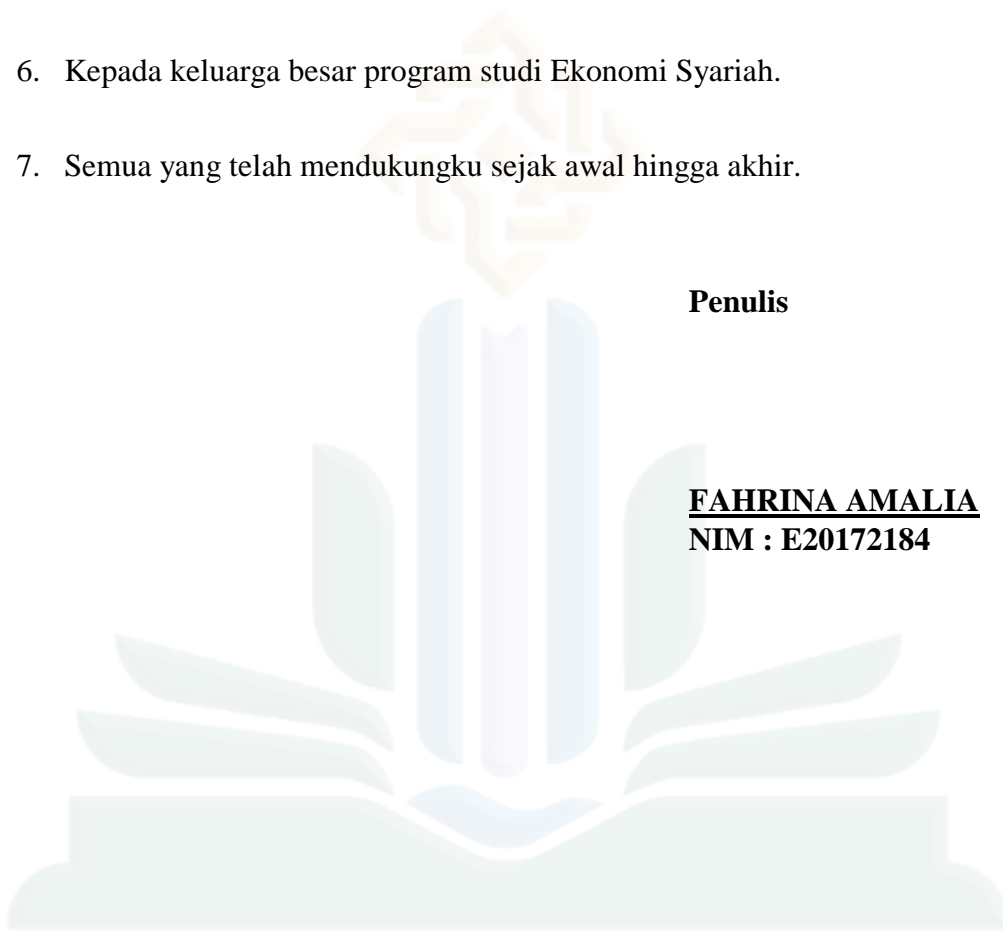
Segala puji bagi Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan syukur dan bahagia kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua, ibu tersayang “Khomsiyatin” dan bapak tercinta “Suwardi” yang selalu setia mendengarkan keluh kesah anakmu, memberi semangat, mendoakan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Curahan cinta serta kasih sayang yang begitu tulus, *support* moral maupun materil atas semua tahapan pendidikan yang saya lalui, jerih payah dan keringat beliau adalah bukti kepeduliannya terhadap pentingnya pendidikan. Doanya yang tak pernah putus beliau ucapkan agar putrinya selalu mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.
2. Terima kasih kepada keluarga besarku yang selama ini telah memberikan doa serta dukungan atas semua tahapan pendidikan yang saya lalui.
3. Kepada masyarakat Desa Tambong yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian ini, serta tak lupa pula terima kasih kepada Pendamping BPNT Kecamatan Kabat.
4. Keluarga kelas ES 4 yang menjadi sahabat sekaligus teman belajar dalam setiap kesempatan.
5. Keluarga kontrakan yaitu Nadya, Fara, Siti, Ami dan Fida sebagai saudara seperjuangan yang selalu memberikan masukan dan semangat bagi saya selama kuliah.

6. Kepada keluarga besar program studi Ekonomi Syariah.
7. Semua yang telah mendukungku sejak awal hingga akhir.

**Penulis**

**FAHRINA AMALIA**  
**NIM : E20172184**



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan secara lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda rosul Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak, amin.

Setelah melalui proses yang panjang ini, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sastra satu. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka sepantasnya peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, Rektor UIN KHAS Jember serta selaku dosen pembimbing skripsi.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S,E.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati I R, M.Si selaku Dosen yang telah mengarahkan dan membimbing proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Siti Masrohatin, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam kegiatan akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami mudah- mudahan bermanfaat. Amin.
7. Seluruh Civitas Akademik IAIN Jember, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
8. Kepala Desa Tambong beserta para staf anggotanya, pemilik E-Warong dan Pendamping BPNT Kecamatan Kabat.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.

Tidak ada kata yang peneliti ucapkan selain do'a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah yang maha kuasa memberi balasan kebaikan pada semua jasa yang telah diberikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran selalu peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan khazanah keilmuan kita semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

**Fahrina Amalia, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, 2021:** *Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.*

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan dari pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pola distribusi bantuan pangan ini melalui E-Warong dengan sistem elektronik menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dimana setiap bulannya KPM memperoleh bantuan sebesar Rp 200.000, hanya bisa dibelanjakan dengan bahan pokok seperti beras dan telur.

Penelitian ini ingin mengetahui beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi? (2) Apa saja kendala efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi? (3) Bagaimana solusi kendala pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi (2) Untuk mengetahui kendala efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi (3) Untuk mengetahui solusi kendala pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dilapangan memperoleh hasil yaitu: (1) Pendistribusian BPNT melalui E-Warong di Desa Tambong sudah efektif. Pendistribusian dilakukan sesuai dengan prinsip 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi. (2) Kendala yang sering terjadi adalah adanya data yang tidak asama antara KTP dengan KKS selain itu juga adanya KKS yang hilang (3) Untuk solusi dari KKS yang hilang adalah melakukan pergantian KKS di Bank Penyalur dengan membawa surat keterangan hilang sedangkan untuk data yang tidak valid harus dilaporkan ke pihak Desa Tambong agar segera ditindak lanjuti.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Pola Distribusi, Bantuan Pangan Non Tunai, E-Warong.*

## ABSTRACT

**Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., Fahrina Amalia, Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., Fahrina Amalia, Prof. Dr. H. Babun Suharto:** *The Effectiveness of the Non-Cash Food Aid Distribution Pattern via E-Warong in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency.*

Non-Cash Food Aid (BPNT) is government-provided food assistance to Beneficiary Families (KPM). Food aid is distributed through E-Warong, an electronic method that use the Prosperous Family Card (KKS). Every month, KPM receives Rp. 200,000 in aid, which can only be spent on basic foods like rice and eggs.

This research aims to answer the following questions: (1) How successful is the distribution pattern of Non-Cash Food Aid through E-Warong in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency? (2) How effective is the distribution pattern of Non-Cash Food Aid through E-Warong in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency? (2) What are the challenges to the success of the Non-Cash Food Aid distribution pattern via E-Warong in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency? (3) What is the solution to the problem of non-cash food aid distribution in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency via E-Warong?

The goals of this study are to: (1) determine the effectiveness of the Non-Cash Food Aid distribution pattern through E-Warong in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency; and (2) determine the effectiveness of the distribution pattern of Non-Cash Food Aid through E-Warong in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency. (2) To assess the efficiency of the E-Warong distribution pattern for non-cash food aid in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency. (3) To find answers to concerns with the Non-Cash Food Aid distribution pattern via E-Warong in Tambong Village, Kabat District, Banyuwangi Regency.

The research method employed in this study is a qualitative approach with a descriptive research design. Observation, interviews, and documentation are used as data collection approaches. A descriptive qualitative analysis was utilized to analyze the data. The researchers employed source triangulation to verify the data's accuracy.

The following are the findings of field research: (1) The dissemination of BPNT through E-Warong in Tambong Village was effective. The distribution follows the 6T principles, which are: right on target, on time, right on pricing, right on quantity, right on quality, and right on administration (2) The occurrence of unequal data between KTP and KKS, in addition to the missing KKS, is a common constraint (3) For lost KKS, bring a missing certificate to the Channeling Bank, while invalid data must be notified to the Tambong Village for prompt action.

**Keywords:** *Effectiveness, Distribution Pattern, Non-Cash Food Assistance, E-Warong.*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	34
1. Efektivitas .....	34

2. Pola distribusi.....	41
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	61
4. E-Warong .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	73
B. Lokasi Penelitian.....	74
C. Subjek Penelitian .....	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	75
E. Analisis Data .....	78
F. Keabsahan Data.....	80
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	81
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>83</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	83
1. Sejarah singkat Desa Tambong.....	83
2. Letak Geografis Desa Tambong.....	84
3. Demografi Desa Tambong .....	84
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	87
1. Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.....	87
a. Tepat sasaran.....	88
b. Tepat kualitas .....	89
c. Tepat jumlah.....	90

d. Tepat harga.....	91
e. Tepat waktu.....	92
f. Tepat administrasi .....	93
2. Kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.....	93
3. Solusi kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi .....	95
C. Pembahasan Temuan.....	97
1. Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melauai E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.....	97
2. Kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.....	99
3. Solusi kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi .....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Keaslian tulisan
2. Matrik penelitian
3. Pedoman wawancara
4. Surat izin penelitian
5. Surat selesai penelitian
6. Jurnal kegiatan
7. Dokumentasi
8. Biodata penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
1.1 Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambong .....	9
1.2 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai se Kecamatan Kabat dan jumlah E-Warong .....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
4.1 Struktur Organisasi Desa Tambong 2020 .....	83
4.2 Jumlah Penduduk Desa tambong 2020 .....	84
4.3 Potensi Sumber Daya Manusia Dari Berbagai Aspek.....	85
4.4 Kesejahteraan Keluarga di Desa Tambong 2020 .....	86
4.5 Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambong Tahun2020.....	86

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa, laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,25% per tahun.<sup>1</sup> Adanya jumlah penduduk yang banyak membutuhkan terobosan kebijakan penyediaan bahan pangan yang adil, murah, kualitas bagus dan juga memenuhi aspek keamanan pangan untuk semua penduduk. Indonesia perlu lebih memanfaatkan keuntungan dari industri bahan pangan.

Pertumbuhan industri pengolahan bahan pangan diharapkan untuk melepaskan dependensi impor bahan baku, adiktif dan bahan penolong bagi makanan dan minuman. Efisiensi diperoleh melalui penggunaan sumber pangan dari dalam negeri diharapkan untuk berpartisipasi meningkatkan kinerja ekspor makanan setengah jadi ataupun olahan. Tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dikarenakan arah kebijakan pangan disusun hanya sesuai kebutuhan di Indonesia untuk jangka pendek dan mengabaikan potensi yang dimiliki.

Dunia telah dan akan terus mengalami krisis permintaan pangan akibat perubahan iklim, komoditas pangan tinggi yang memenuhi kebutuhan energi, dan lahan terbatas, jadi produksi tidak mampu memenuhi permintaan. Adapun yang menyebutkan bahwa dalam jangka Panjang, kenaikan harga makanan disebabkan oleh degradasi sumber daya alam, perubahan iklim global dan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 2020* (Jakarta : BPS, 2020), 3.

meningkatnya jumlah penduduk. Indonesia yang mampu memproduksi dan potensi pasar domestik yang besar harus berusaha memenuhi kebutuhan pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri.<sup>2</sup>

Kesadaran untuk melakukan perubahan kebijakan pengelolaan pangan di Indonesia itu muncul pada tahun 2011, melalui perubahan Undang-Undang mengenai pangan yang ditentukan dari aspek produksi, distribusi dan perdagangan. Sejak tahun 2012, Undang-Undang juga telah dibahas mengatur perdagangan, salah satunya komoditas yang diatur adalah komoditas pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berisi aturan main untuk penyelenggaraan pangan berdasarkan prinsip kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, sebagai ganti dari prinsip ketahanan pangan yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pembangunan kemerdekaan dan kedaulatan pangan sebagai strategi pencegah krisis pangan dan mengentaskan masyarakat, termasuk petani dari kemiskinan.

Urusan pembangunan pangan dan pertanian bukan hanya masalah teknis tapi urusan paradigma. Diperlukannya keberanian untuk mengubah arah pembangunan nasional dari ekonomi impor ke ekonomi keadilan domestik. Sangat dibutuhkan membangun kembali kebijakan politik dan ekonomi negara melalui perubahan struktural dalam kebijakan anggaran, mata uang, keuangan dan perdagangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nyak Ilham dan I Wayan Rusastra, "Daya Saing Komoditas Pertanian : Konsep, Kinerja dan Kebijakan Pengembangan", *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*, Vol. 3 (Januari, 2009), 48.

<sup>3</sup> Lukman Adam, "Kinerja Ekonomi Pangan Nasional : Dinamika dan Reformasi Kebijakan", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 (Desember, 2014), 174.

Untuk membangun ketahanan pangan tapi tidak diikuti upaya menegakkan kedaulatan pangan akan menciptakan masalah sosial baru, seperti ketergantungan pada beras impor dan produktivitas petani rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan keluarga ialah : sistem informasi, produksi pangan, cadangan pangan, daya beli, kesempatan kerja, pendidikan, infrastruktur pedesaan, beban keluarga, pengeluaran non makanan, akses modal dan organisasi sosial. Menyikapi faktor-faktor tersebut, perlu dirumuskan strategi penguatan kondisi ketahanan sosial ekonomi masyarakat menuju ketahanan pangan keluarga yang antara lain dapat dilakukan melalui : meningkatkan akses petani terhadap teknologi, kredit, fasilitas produksi dan pasar, pengembangan infrastruktur pertanian, stabilitas dan informasi harga pangan dan ketersediaan pasar lokal.<sup>4</sup>

Untuk mencegah dan menghadapi situasi dinamika permasalahan pangan memerlukan terobosan politik pangan antara lain melalui : (a) urusan pangan kembali menjadi urusan pemerintah pusat guna menguatkan manajemen pangan nasional, (b) produksi manajemen pangan sebagai sistem agribisnis utuh, termasuk pembiayaan, infrastruktur dan manajemen pemasaran terpadu dengan cara yang terkoordinasi manajemen, (c) politik keuangan nasional termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kredit perbankan harus mendukung program pembangunan nasional, (d) kompetisi penggunaan lahan pertanian harus mengutamakan komoditas pangan utama yang diatur dalam

---

<sup>4</sup> Ibid., 176.

undang-undang, (e) insentif bagi petani termasuk akses terhadap infrastruktur ekonomi, informasi, teknologi dan pasar, (f) pengelolaan pangan nasional harus terbentuk dalam satu kelembagaan yang efektif, entah itu di tingkat pusat maupun di daerah.<sup>5</sup>

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi didefinisikan beberapa maksud, diantaranya adalah : (a) ketahanan pangan dan gizi yaitu kondisi di mana kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat terpenuhi, pangan tersedia cukup, baik dilihat dari mutu ataupun jumlahnya, gizi berkecukupan, terjangkau serta merata, agar masyarakat mendapatkan gizi yang baik serta hidup sehat, (b) pangan yaitu semua yang berasal dari hasil perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, termasuk diolah atau tidak diolah yang digunakan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, (c) ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta bisa impor apabila produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan, (d) distribusi pangan yaitu penyaluran bahan pangan secara menyeluruh atau merata setiap saat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.<sup>6</sup>

Fokus utama Program Ketahanan Pangan Indonesia adalah beras yang mana beras merupakan sumber primer kalori bagi sebagian besar penduduk. Program subsidi beras untuk orang miskin (Raskin) pertama kali dilaksanakan di tahun 2002 serta merupakan program perlindungan sosial terbesar di

---

<sup>5</sup> Ibid., 178.

<sup>6</sup> Yusup Rachmat Hidayat, "Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai", *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 2 (Oktober, 2018), 2

Indonesia. Rata-rata raskin mewakili 30% dari anggaran perlindungan sosial. Ini berkembang berasal dari program subsidi beras nasional lintas *sectoral* sementara yang dilaksanakan pada tahun 1998 sesudah krisis keuangan Asia, menjadi program perlindungan sosial untuk keluarga miskin. Raskin memberikan setiap rumah tangga miskin 15 kg beras setiap bulan. Pada tahun 2015, dengan nama baru Raskin pemerintah mengalokasikan kurang lebih \$1,4 miliar untuk subsidi ini, dan BULOG mendistribusikan 2.7 juta ton beras kepada 15,6 juta rumah tangga miskin.<sup>7</sup>

Awalnya program Raskin ialah bagian dari sistem Ketahanan pangan Nasional, yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian serta kedaulatan pangan. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi pada kebijakan ketahanan pangan nasional. Raskin sendiri ialah program yang dibuat untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta mempertahankan kesejahteraan mereka dan memenuhi kebutuhan pangan, terutama beras. Namun Raskin dan rastra menerima kritik terutama mengenai kualitas yang buruk, dampaknya terhadap beras lokal dan ketidakefisienan penyaluran program. Pada 16 Maret 2016 Presiden Joko Widodo memerintahkan reformasi program Raskin, intruksi ini disampaikan Presiden di Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Pengentasan Kemiskinan serta Ketimpangan Ekonomi.<sup>8</sup> Presiden meminta agar sistem pendistribusian Raskin diubah menjadi mekanisme kupon /non tunai.

---

<sup>7</sup> Muhammad Belawane, *Kelembagaan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai* (Jakarta : PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI, 2020), 2.

<sup>8</sup> Ibid., 4.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, mencukupi konsumsi pangan, bermutu, aman, dan gizi seimbang, secara menyeluruh baik di tingkat nasional, daerah ataupun perorangan. Pemerintah telah melaksanakan program pangan sejak lama. Program bantuan pangan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan upaya ketahanan pangan nasional yaitu melalui penyaluran beras kepada masyarakat yang kurang mampu. Awalnya program ini bernama Program Raskin/Rastra.

Raskin/Rastra ini beralih menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).<sup>9</sup> Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara Nontunai berasal dari pemerintah yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya dipergunakan untuk membeli bahan pangan yang sudah ditentukan.<sup>10</sup>

Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Tujuan program bantuan pangan Non Tunai (BPNT) ialah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta memberikan bahan pangan menggunakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yaitu salah satunya untuk meningkatnya ketahanan pangan pada taraf Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus menjadi mekanisme perlindungan sosial serta penanggulangan

---

<sup>9</sup> Hidayat, *Distribusi Beras Bulog*, 5.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, 3.

kemiskinan serta Bantuan Pangan Non Tunai dipersyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.<sup>11</sup>

Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan data yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, serta diolah lebih lanjut oleh TNP2K. Dari informasi tersebut, TNP2K membentuk urutan keluarga menurut peringkat kesejahteraan serta status sosial ekonominya. Dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai ini dibutuhkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.<sup>12</sup>

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur pulau Jawa. Dengan luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup>, merupakan kabupaten terluas di pulau Jawa. Secara administrative, Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 25 kecamatan, 189 desa dan 28 kelurahan. Jumlah penduduk Banyuwangi berdasarkan hasil

---

<sup>11</sup> Ibid., 3.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 3.

proyeksi sensus Penduduk 2020 sebesar 1.708.114 jiwa pada tahun 2020.<sup>13</sup> Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Banyuwangi mulai dilaksanakan pada April 2018. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan BTN, karena PKH yang sudah berjalan sebelumnya menggunakan Bank BTN.

Jumlah penerima BPNT di Kabupaten Banyuwangi 105.139 KPM, dimana 82.913 adalah KPM PKH irisan dengan BPNT dan 22.226 KPM merupakan penerima BPNT murni. Bank BTN bekerjasama dengan E-Warong untuk proses pencairan dana bantuan sosial yang bersifat non tunai ini. E-warong adalah pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan di tunjukkan sebagai tempat pembelian sembako oleh KPM.<sup>14</sup>

Desa Tambong adalah salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Desa Tambong terletak sejauh 5 km dari jalan raya Kabat. Desa Tambong merupakan salah satu desa yang menerima bantuan program Bantuan Pangan Nontunai. Jumlah keluarga prasejahtera yaitu 421, 223 diantaranya mendapatkan bantuan tersebut. Jadi 53% keluarga prasejahtera sudah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah masyarakat yang datanya sudah tercatat di Dinas Sosial Banyuwangi.

Jadi masyarakat yang benar-benar tidak mampu lah yang mendapatkan bantuan ini. Selain itu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini dilakukan

---

<sup>13</sup> Sensus Penduduk 2020 No. 02/01/3510/Th.XIX/21 Januari 2021.

<sup>14</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019* (Jakarta, 2019), 8.



secara transparansi guna untuk mengurangi adanya penyimpangan.<sup>15</sup> Di Desa Tambong ini setiap pemberian Bantuan Pangan Non Tunai didampingi oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pendamping BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Berikut jumlah data penerima BPNT di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi :

Tabel 1.1  
Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tambong Kecamatan Kabat kabupaten Banyuwangi

No	Dusun	Jumlah Penerima BPNT
1	Krajan	102
2	Kejoyo	92
3	Kebonsari	29
		223

Sumber: *Data Penerima BPNT Desa Tambong 2020*

Bantuan Pangan Non Tunai ini tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan yaitu seperti beras dan telur dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera di E-Warong. Kartu Keluarga Sejahtera ini ialah instrumen pembayaran yang mempunyai fitur uang elektronik serta tabungan yang bisa dipergunakan menjadi media penyaluran berbagai bantuan sosial. E-Warong ialah agen Bank, pedagang atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan Bank penyalur serta ditunjuk menjadi tempat penarikan / pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ibid., 2.

<sup>16</sup> Ibid., 8.

Bantuan Pangan Non Tunai ini berbeda dari bantuan sebelumnya yaitu Rastra. Karena pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening *wallet* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT.<sup>17</sup> Setelah itu jika dana BPNT sudah masuk ke dalam rekening *wallet* maka Keluarga Penerima Manfaat bisa melakukan pembelian bahan-bahan pokok seperti beras dan telur di E-Warong. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai ini juga mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mekanisme pembagian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan prosedur E-Warong yaitu warong Ibu Norma sebagai tempat pembelian bahan pangan. Pembelian bahan pangan dilaksanakan setelah Keluarga Penerima Manfaat menerima Bantuan Pangan Non Tunai senilai Rp 200.000. Keluarga Penerima Manfaat cukup datang ke E-Warong Ibu Norma dengan membawa KKS, lalu melakukan pembelian beras dan telur dengan membayar menggunakan KKS tersebut.

Dalam program Bantuan Pangan Non Tunai ini pelayanan bantuan harus tetap melaksanakan prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.<sup>18</sup> Dengan pendistribusian BPNT melalui E-Warong diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat

---

<sup>17</sup> Ibid., 79.

<sup>18</sup> Ibid., 2.

dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani secara elektronik. Namun di Desa Tambong ini hanya ada 1 warung yang memiliki EDC sehingga hanya warung tersebut yang dapat melayani pembelian bahan pangan.

Tabel 1.2  
Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai  
se Kecamatan Kabat dan jumlah E-Warong

<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah KPM</b>	<b>Jumlah E-Warong</b>
Bareng	138	2
Benelan Lor	210	3
Bunder	232	3
Dadapan	237	3
Gombolirang	148	2
Kabat	160	2
Kalirejo	190	3
Kedayunan	170	2
Labanasem	123	2
Macanputih	190	3
Pakistaji	216	3
Pendarungan	163	2
Pondok Nongko	272	4
Tambong	223	1

Sumber: *Data Penerima BPNT Kecamatan Kabat*

Selain itu masih ditemui penerima kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tidak mendapatkan saldo dalam kartu tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta apa saja kendala- kendala yang terjadi pada pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan melakukan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS POLA DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI MELALULI E-

WARONG DI DESA TAMBONG KECAMATAN KABAT KABUPATEN BANYUWANGI”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa saja kendala pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana solusi kendala pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan ilustrasi/gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.<sup>19</sup> Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 45.

2. Untuk mengetahui kendala pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui solusi kendala pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan sesudah selesai melakukan penelitian. Kegunaan bisa berupa kegunaan yang bersifat teoritis serta kegunaan praktis. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>20</sup> Adapun manfaat yang dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Menambah dasar pengetahuan dan tentang pola distribusi khususnya Bantuan Pangan Non Tunai yang sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi pemerintah Desa Tambong : sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan sistem yang telah ada.
- b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember: untuk menambah referensi bagi pihak UIN KHAS Jember dan memberikan sumbangsih dalam

---

<sup>20</sup> Ibid., 45.

menambah wawasan pengetahuan tentang pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai.

## E. Definisi Istilah

### 1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Artinya efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>21</sup>

### 2. Pola Distribusi

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat atau melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Distribusi artinya proses penyampaian barang atau jasa yang berasal dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan.<sup>22</sup> Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*), waktu, tempat, serta pengalihan hak milik. Jadi efektivitas pola distribusi dapat disimpulkan bahwa tercapainya bentuk penyaluran barang/jasa dari produsen ke konsumen.

<sup>21</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 (Februari, 2012), 3.

<sup>22</sup> Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 93.

### 3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai (uang elektronik) dari pemerintah pada KPM setiap bulannya serta dipergunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di E-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.<sup>23</sup>

### 4. E-Warong

E-Warong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditunjuk menjadi tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E- Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.<sup>24</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

BAB I pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

---

<sup>23</sup> Tim Pengendali, *Pedoman Umum Bantuan*, 6.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 8.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV penyajian data dan analisis, dalam bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V penutup atau kesimpulan dan saran, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Berbicara tentang Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong tidak cukup hanya berupa tulisan lepas, akan tetapi memerlukan beberapa tulisan ilmiah, tesis, disertasi maupun penelitian-penelitian lain. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Kardila Fakni (2018) skripsi dengan judul “Fungsi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang”, STKIP PGRI Sumatera Barat. Fokus penelitian ini tentang fungsi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada masyarakat miskin di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa fungsi program KKS yang belum selesai seperti belum berkurangnya beban penerima KKS, belum terbantunya kebutuhan pangan penerima KKS. Adapun persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teori yang digunakan yakni tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian, peneliti sekarang membahas tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut sedangkan peneliti terdahulu

membahas tentang *structural* fungsionalisme fokus penelitiannya meneliti tentang fungsi KKS pada masyarakat miskin.<sup>25</sup>

2. Ade Nurkhotijah (2018) skripsi dengan judul “Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Fokus penelitian ini adalah pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu berupa analisis regresi linear sederhana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari hasil kuisisioner dan wawancara. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan hipotesis dengan menggunakan Program *Statistic Product And Service Solution* (SPSS) versi 25. Berdasarkan pengujian diatas bahwa variabel BPNT (X) berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung variabel Penyaluran BPNT, nilai t hitung variabel X (Penyaluran BPNT) sebesar (7.462) sedangkan nilai t tabel sebesar (1.990). Atau dengan kata lain H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima karena t hitung (7.462) > t tabel (1.990). serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Adapun untuk nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,641 yang berarti tingkat hubungannya kuat dan nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,410. Hal ini dapat diartikan bahwa Untuk koefisien determinasi

---

<sup>25</sup> Kardila Fakni, “Fungsi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang”, (Skripsi: STKIP PGRI, Sumatera Barat, 2018).

(R2) sebesar 0,410 menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai mempunyai pengaruh 41,0% terhadap kesejahteraan keluarga miskin adapun sisanya 59,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui. kesimpulan dari penelitian ini artinya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Adapun persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode yang digunakan, peneliti yang sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus penelitian peneliti yang sekarang tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan fokus penelitiannya yaitu pengaruh BPNT terhadap kesejahteraan keluarga miskin.<sup>26</sup>

3. Ahda Sulukin Nisa (2019) skripsi dengan judul “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus penelitian dalam skripsi ini tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif

---

<sup>26</sup> Ade Nurkhotijah, “Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten”, (Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

ekonomi islam. Hasil dalam penelitian ini adalah program BPNT di Desa Merak Batin ini belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program BPNT di Desa Merak Batin ini hanya dapat memenuhi 3 indikator saja yaitu tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas. Program BPNT ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa belum ada yang terpenuhi karena BPNT di Desa Merak Batin ini hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin saja. Implementasi BPNT di Desa Merak Batin dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar *tafakul* (Jaminan Sosial) dan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakatnya. Adapun persamaan yaitu terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif dan pada teori yang digunakan yaitu tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian, peneliti sekarang meneliti tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu meneliti

tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

4. M. Hidayat Panuntun Muslim (2019) jurnal dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kuranji Kota Padang”, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Fokus penelitian ini tentang implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum dapat dijalankan sesuai SOP yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memahami program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi antara petugas BPNT dengan KPM belum berjalan dengan baik maka berpengaruh kepada pelaksanaan Program BPNT sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak dapat tercapai secara maksimal. Adapun persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema yang digunakan yakni tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian, peneliti sekarang membahas tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang implementasi program Bantuan

---

<sup>27</sup> Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natae Kabupaten Lampung Selatan)”, (Skripsi: UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

Pangan Non Tunai yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.<sup>28</sup>

5. Mustikasari (2019) skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fokus penelitian ini tentang pelaksanaan kebijakan program BPNT di Kelurahan Cipadung Kulon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program BPNT di Kelurahan Cipadung Kulon belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terlihat ada beberapa dimensi yang masih mengalami kendala. Adapun hambatan atau permasalahan yang berarti yakni masih ada masyarakat yang merasa bahwa bantuan ini dirasa kurang memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, masih adanya ketidaktepatan penerima BPNT, kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya respon para pelaksana mengenai keluhan-keluhan masyarakat dan keterlambatan pembuatan kartu KKS KPM dan keterlambatan pendistribusian beras. Adapun persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah, peneliti yang sekarang

---

<sup>28</sup> M. Hidayat Panuntun Muslim, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kurangji Kota Padang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2019), 66-67

meneliti tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang pelaksanaan kebijakan program BPNT di Kelurahan Cipadung Kulon.<sup>29</sup>

6. Nunung Ifanatul Mustafida (2019) skripsi dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Fokus penelitian ini tentang implementasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT sudah sesuai dengan buku panduan program BPNT tahun 2018. Meskipun dalam proses penyaluran program masih memiliki beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat maupun keluarga penerima manfaat. Lalu masih terkendala pada kurangnya E-Warong atau agen penyalur yang menyebabkan antrian keluarga penerima manfaat dalam pengambilan bantuan. Dan juga kurangnya koordinasi antar pendamping BPNT baik dari pendamping BPNT keluarga penerima manfaat murni maupun pendamping sosial PKH. Adapun persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah,

---

<sup>29</sup> Mustikasari, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018”, (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

peneliti yang sekarang meneliti tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang implementasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).<sup>30</sup>

7. Farah Reina Gumbira (2019) skripsi dengan judul “Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Variabel Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno belum terbukti dengan baik dengan program terarah rendah. perubahan nyata berupa kemandirian dari kelompok sasaran setelah mendapat bantuan program. Namun di sisi lain program BPNT cukup efektif pada variabel ketepatan sasaran. Kendala yang terjadi dalam program BPNT adalah kurangnya pelaksana karena Tim Koordinasi Dinas Sosial Pangan Kabupaten belum terbentuk dan Tim Koordinasi Pangan Kota yang sudah dibentuk belum berjalan maksimal. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi yang optimal antar pelaksana belum optimal untuk sosialisasi dan edukasi kepada kelompok binaan, belum ada tim pemantau dan tim pengaduan yang terlibat dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Adapun persamaannya

---

<sup>30</sup> Nunung Ifanatul Mustafida, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”, (Skripsi: Universitas Negeri Jember, Jember, 2019).



terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah, peneliti yang sekarang meneliti tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai.<sup>31</sup>

8. Sri Dewi Sasmita Pantu (2019) skripsi dengan judul “Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari program Bantuan Pangan Non Tunai daerah (BPNT-D) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Sosial kabupaten/kota Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terlihat bahwa di wilayah pedesaan program BPNT-D tidak memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan konsumsi rumah tangga sasaran (masyarakat yang termasuk pada kelompok berpendapatan 20% ke bawah). Sedangkan di wilayah perkotaan

---

<sup>31</sup> Farah Reina Gumbira, “Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”, (Skripsi: Universitas Andalas, Padang, 2019).

program BPNT-D menunjukkan keefektifan yang cukup baik. . Adapun persamaannya terletak pada tema penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode yang digunakan, peneliti yang sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan fokus masalah, peneliti yang sekarang meneliti tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan fokus penelitiannya yaitu menganalisis dampak dari program Bantuan Pangan Non Tunai daerah (BPNT-D) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo.<sup>32</sup>

9. Fitroh Amalika Dewi (2019) skripsi dengan judul “Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Kendal (Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh Tahun 2018).” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo, Semarang. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu sebuah penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Hasil penelitian ini adalah program BPNT di desa Johorejo sudah terlaksana dengan baik.

---

<sup>32</sup> Sri Dewi Sasmita Pantu, “Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.”, (Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2019).

Masyarakat penerima mengatakan BPNT membantu dalam perekonomian mereka. Setelah berjalannya BPNT, masalah perekonomian sedikit teratasi. Uang yang biasa dibelanjakan buat beli sembako bisa digunakan untuk kebutuhan lain, setidaknya dapat meringankan pengeluaran mereka. Adapun persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan pangan Nontunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah, peneliti yang sekarang meneliti tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang kebijakan Bantuan Pangan Nontunai.<sup>33</sup>

10. Wiwit (2020) skripsi dengan judul “Monitoring dan Evluasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu.” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang kurang tepat. Pelaksanaan program BPNT di masing-masing daerah tidak sama. Bahkan ada KPM yang tidak tahu jika menerima bantuan BPNT Sosial. Maka untuk mengetahui implementasi program BPNT di Batu diperlukan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,

---

<sup>33</sup> Fitroh Amalika Dewi, “Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Kendal (Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh Tahun 2018)”, (Skripsi: UIN Walisongo, Semarang, 2019).

memberikan gambaran tentang perkembangan penerapan program BPNT dalam pengentasan kemiskinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori penelitian Program BPNT menggunakan *Monitoring* dan Evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang mengemukakan bahwa *monitoring* merupakan kegiatan internal dan berkelanjutan, sumber informasi yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program BPNT di Kota Batu telah melaksanakan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan telah berjalan cukup baik oleh fasilitator BSP dan program BPNT dinilai sudah tepat sasaran, sehingga untuk mempercepat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Program BPNT yang telah diberikan kepada KPM Kota Batu sebanyak 5.649 KPM pada tahun 2018 kemudian menurun pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3.992 KPM. Faktor penghambat dalam *monitoring* dan evaluasi program BPNT adalah yang pertama kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua, yaitu waktu. Adapun persamaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan tema penelitiannya yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan pangan Non Tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah, peneliti yang sekarang meneliti tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan tersebut, sedangkan peneliti terdahulu

meneliti tentang *monitoring* dan evaluasi kebijakan program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan.<sup>34</sup>

Dari beberapa penelitian di atas bisa dilihat di tabel berikut ini perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang:

Tabel 2.1  
Tentang perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Kardila Fakni (2018). Program studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat	Fungsi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah fungsi KKS pada masyarakat miskin, sedangkan peneli sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.	Persamaan penelitian terletak pada teori yang digunakan yaitu BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif.
Ade Nurkhotijah (2018). Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Pengaruh BPNT terhadap kesejahteraan keluarga miskin sedangkan peneliti sekarang tentang	Persamaan penelitian terletak pada tema, yaitu sama-sama meneliti tentang BPNT

<sup>34</sup> Wiwit, "Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

Banten		efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya. Metode penelitian peneliti terdahulu adalah kuantitatif sedangkan peneliti sekarang kualitatif.	
Ahda Sulukin Nisa (2019). Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung	Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan peneliti sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.	Persamaan penelitian terletak pada teori yang digunakan yaitu BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif
M. Hidayat Panuntun Muslim (2019). Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kuranji Kota Padang	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah implementasi program Bantuan	Persamaan penelitian terletak pada tema yaitu tentang BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif

		Pangan Non Tunai yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sedangkan peneliti sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.	
Mustikasari (2019). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Pelaksanaan kebijakan program BPNT di Kelurahan Cipadung Kulon, sedangkan peneliti sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.	Persamaan penelitian terletak pada tema yaitu tentang efektivitas BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif
Nunung Ifanatul Mustafida (2019). Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangharjo Kecamatan	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Implementasi dari program Bantuan Pangan Non Tunai	Persamaan penelitian terletak pada tema yaitu tentang efektivitas BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif

dan Ilmu Politik Universitas Jember	Kalibaru Kabupaten Banyuwangi	(BPNT), sedangkan peneliti sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.	
Farah Reina Gumbira (2019). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Efektivitas program Bantuan Pangan Nontunai, sedangkan peneliti sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.	Persamaan penelitian terletak pada tema yaitu tentang efektivitas BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif
Sri Dewi Sasmita Pantu (2019). Program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo	Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.	Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Menganalisis dampak dari program Bantuan Pangan Non Tunai daerah (BPNT-D) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo, sedangkan peneliti	Persamaan penelitian terletak pada tema yaitu tentang efektivitas BPNT.



		<p>sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya. Selain itu metode yang digunakan juga berbeda peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif.</p>	
<p>Fitroh Amalika Dewi (2019). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang</p>	<p>Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Kendal (Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh Tahun 2018)</p>	<p>Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai, sedangkan peneliti sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada tema yaitu tentang efektivitas BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif</p>
<p>Wiwit (2020). Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah</p>	<p>Monitoring dan Evluasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam penanggulangan</p>	<p>Perbedaan penelitiannya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu adalah Monitoring dan evaluasi kebijakan program BPNT</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada tema yaitu tentang efektivitas BPNT. Metode yang digunakan sama-sama kualitatif</p>

h Malang	gan Kemiskinan di Kota Batu	dalam penanggulangan kemiskinan, sedangkan peneliti sekarang tentang efektivitas pola distribusi BPNT serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dan bagaimana solusinya.	
----------	-----------------------------------	--	--

(sumber: diolah dari penelitian terdahulu)

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan sepuluh penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu di atas fokus penelitiannya pada kebijakan program BPNT dalam penanggulangan kemiskinan dan implementasinya dari program BPNT tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas pola distribusi BPNT melalui E-Warong serta kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian tersebut dan bagaimana solusinya.

## B. Kajian Teori

### 1. Efektivitas

#### a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan

di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>35</sup>

Adapun efektivitas menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Roulette efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggaran.
- 2) Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukannya.
- 3) Menurut Gipson efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Dari pengertian para ahli di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila tujuan telah dicapai barulah dapat dikatakan efektif.

#### b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas,

---

<sup>35</sup>Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 (Februari, 2012), 3.

maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>36</sup>

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional

---

<sup>36</sup>Ibid., 4.

<sup>37</sup>Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 107.

- 4) Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambil keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan di masa yang akan datang
- 5) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

c. Pendekatan efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan", *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari, 2014), 8-10.

### 1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

### 2) Pendekatan sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat

memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, di mana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

### 3) Pendekatan proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar di mana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

#### 4) Efektivitas distribusi Bantuan Pangan Non Tunai

Keefektifan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai dapat dinilai melalui indikator keberhasilan, yaitu:<sup>39</sup>

- a) Tepat sasaran: pendistribusian dikatakan tepat sasaran apabila Bantuan Pangan Non Tunai diberikan pada keluarga penerima manfaat yang namanya terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai.
- b) Tepat jumlah: pendistribusian dikatakan tepat jumlah apabila jumlah bahan pangan yang dibeli oleh keluarga penerima manfaat sama dengan jumlah yang ditentukan, seperti beras 15kg.
- c) Tepat harga: harga yang dibayarkan oleh keluarga penerima manfaat sebesar Rp 200.000, sama seperti jumlah bantuan yang diberikan.
- d) Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi bahan pangan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
- e) Tepat kualitas: kualitas bahan pangan yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat standar kualitas beras, tidak boleh menggunakan beras yang tidak layak untuk dimakan.
- f) Tepat administrasi: terpenuhinya administrasi secara benar dan tepat.

---

<sup>39</sup>Zulfa Emalia, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung*, Vol. 6 No. 1 (Februari, 2013), 49-50.



## 2. Pola distribusi

### a. Pengertian pola distribusi

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh. Pola adalah bentuk yang dipakai sebagai acuan atau dasar membuat atau melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Distribusi berakar dari Bahasa Inggris *distribution*, yang artinya penyaluran. Walaupun kata dasarnya mendistribusikan, berdasarkan kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadilly, berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan mengageni. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia distribusi adalah proses pengiriman barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan pengguna kapan dan di mana barang atau jasa tersebut dibutuhkan. Distribusi adalah sebuah tantangan ketika sebuah perusahaan telah selesai memproses produk, distribusi ini tentang bagaimana produk dikirim ke konsumen. Distribusi ialah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi memiliki peran yang sangat penting dalam bidang penjualan. Kepuasan berasal dari ketika konsumen mendapatkan barang kebutuhan mereka dengan mudah di daerah tempat tinggal mereka. Itu semua tergantung pada kegiatan distribusi yang dilakukan dengan baik.

Jadi dapat dipahami dari pengertian di atas bahwasannya distribusi ialah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke para konsumen, agar konsumen bisa dengan mudah mendapatkan

barang yang dibutuhkan. Distribusi juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Karena jika distribusi berhasil maka tujuan perusahaan akan tercapai. Adapun para tokoh teori sosiologi klasik telah berbicara tentang distribusi sudut pandang dan isi dari teori tersebut beragam, antara lain:

1) Karl Marx (1818 – 1883)

Beberapa karya Karl Marx berhubungan dengan penjelasan tentang aspek-aspek pasar seperti uang, transportasi dan perdagangan. Dalam *Capital: A Critique of Political Economy* (1867/1967), Marx menjelaskan tentang peredaran barang. Ia melihat 3 jenis peredaran barang dagangan yang dialami umat manusia sepanjang sejarah. Peredaran barang yang sifatnya sangat sederhana adalah jenis K-K yaitu suatu barang dipertukarkan secara langsung dengan barang dagangan lain. Tipe ini dikenal dengan barter, merupakan bentuk pertukaran komoditi yang pertama dalam sejarah umat manusia. Bentuk kedua adalah tipe K-U-K yaitu di mana barang diubah menjadi uang, kemudian uang menjadi barang kembali. Kedua tipe sirkulasi yang disebut barter hanya terdapat dalam masyarakat pra-kapitalis. Dalam masyarakat kapitalis, tipe sirkulasi komoditi berubah menjadi U-K-U yaitu uang digunakan untuk membeli komoditi kemudian komoditi dijual untuk memperoleh uang.

## 2) George Simmel (1858-1918)

Simmel tidak langsung meletakkan dasar dan berkontribusi pada perkembangan pemikiran sosiologi tentang distribusi, tetapi ia menyentuh salah satu aspek distribusi, yaitu uang. *The philosophy of Money* (1907-1978) merupakan karya monumental dalam memahami sejarah perkembangan uang dari sudut sosiologi. Dalam bukunya, Simmel memulai dengan diskusi tentang bentuk-bentuk umum dari uang dan nilai. Kemudian dia menjelaskan tentang dampak uang terhadap “*Inner World*” dari actor dan terhadap budaya secara umum. Dalam tesisnya tentang hubungan antara nilai dan uang, ia menjelaskan bahwa orang menciptakan nilai dengan menciptakan objek, memisahkan diri mereka sendiri terhadap objek yang diciptakan, dan kemudian mencari jalan keluar terhadap jarak, rintangan dan kesulitan yang muncul dari objek yang diciptakannya tersebut.

## 3) Max Weber (1864-1920)

Max Weber adalah seorang sosiolog yang lebih memperhatikan distribusi pertukaran di pasar. Menurut Weber, ekonomi seharusnya merupakan ilmu yang luas. Dalam *Economy and Society*, Weber melihat bahwa suatu pasar ada apabila di mana terdapat persaingan, meskipun hanya satu sisi (sepihak), bagi kesempatan dari pertukaran di antara suatu keberagaman partai-partai yang potensial. Kumpulan orang yang berbeda disatukan pada

suatu tempat, seperti pada tempat berdagang lokal, pekan raya (pasar jarak jauh), atau pertukaran (pasar perdagangan) hanya merupakan salah satu pembentuk pasar yang utama. Menurut Weber tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Pada tahap pertama, rekanan yang potensial diarahkan pada penawaran mereka terutama oleh tindakan potensial dari kelompok besar yang tidak terbatas atau pesaing fiktif, dan bukan oleh tindakan mereka sendiri. Tahap kedua merupakan tahap yang terstruktur secara berbeda. Pada fase ini hanya dilakukan barter yang lengkap dengan rekanan yang dekat. Weber juga melihat elemen perebutan atau konflik dalam pasar. Dia menggunakan istilah perebutan pasar (*market struggle*) ketika ia menjelaskan pertempuran antara seseorang dengan lainnya di pasar. Konsep persaingan digunakannya ketika menjelaskan konflik yang damai, suatu usaha formal yang damai untuk memperoleh pengontrolan terhadap kesempatan dan keuntungan yang diharapkan oleh yang lainnya. Sedangkan pertukaran di sisi ini dilihatnya sebagai suatu kompromi kepentingan dari bagian pada partai-partai, selama barang-barang atau keuntungan yang lain sebagai kompensasi timbal balik.

4) Karl Polanyi (1886-1964)

Menurut Polanyi dan rekan-rekannya, ekonomi masyarakat pra-industri tertanam dalam institusi sosial, politik, dan agama. Ini berarti bahwa fenomena seperti perdagangan, uang, dan pasar diberi tujuan selain mencari keuntungan. Kehidupan ekonomi dalam masyarakat pra industri ditentukan oleh keluarga subsistensi, timbal balik, dan redistribusi. Sedangkan dalam masyarakat modern, sistem redistribusi tersebut tidak lagi mendominasi, melainkan digantikan oleh ekonomi pasar yang bercirikan “pasar yang mengatur dirinya sendiri”.

5) Talcott Parsons (1902-1979) dan Neil J. Smelser

Dalam membahas fenomena ekonomi dan masyarakat, seperti telah disinggung sebelumnya, Parsons dan Smelser (1956) menggunakan skema AGIL, yaitu adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pola pemeliharaan laten (L). Parsons dan Smelser melihat uang, suatu aspek pertukaran di pasar, sebagai peran penghubung antara produksi dan pertukaran. Mereka menjelaskan hubungan antara keduanya dengan memperhatikan baik pemikiran ekonomi klasik maupun sosiologi. Senada dengan pemikiran ekonomi klasik, uang merupakan generalisasi dari daya beli yang mengontrol keputusan bagi pertukaran barang dan jasa.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid., 94-103.

Sedangkan distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain:

- 1) Syafi'i Antonio mengatakan bahwa pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yaitu distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang didasarkan pada aspek keadilan sosial masyarakat.
- 2) Menurut Philip Kotler, distribusi adalah seperangkat kemitraan yang mengambil alih hak atau membantu mentransfer hak atas barang atau jasa yang berpindah dari produsen ke konsumen.
- 3) Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi menjadi pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.
- 4) Menurut Jaribah, arti penting distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas, yang meliputi pengaturan kepemilikan atas unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.<sup>41</sup>

Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang

---

<sup>41</sup> Rahmawati Muin, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1 (2013).

memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.<sup>42</sup>

#### b. Tujuan Distribusi

Tujuan distribusi yaitu:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan oksigen, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.<sup>43</sup>
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya serta miskin akan menyebabkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan perilaku permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Islam mengakui adanya disparitas jumlah harta antar individu dalam masyarakat. Sebab itu ada yang kaya dan ada pula yang miskin, tetapi jurang pembeda pada mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial.<sup>44</sup> Allah berfirman :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

<sup>42</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), 130.

<sup>43</sup> Ibid., 147-148.

<sup>44</sup> Ibid., 148.

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)<sup>45</sup>

3) Untuk terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat.

Tujuan distribusi merupakan terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sebagai akibatnya tercipta solidaritas di dalam masyarakat muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.<sup>46</sup>

c. Prinsip-prinsip dalam distribusi

Agar distribusi memberikan makna yang tepat, maka perlu

diperhatikan prinsip-prinsip distribusi berikut ini:

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 59 : 7.

<sup>46</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, 149.



### 1) Prinsip keadilan dan pemerataan

Keadilan pada Islam adalah prinsip fundamental dalam semua aspek kehidupan, termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan.<sup>47</sup> Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Harapan keadilan yang wajib dijalankan oleh negara terhadap masyarakat mencakup semua sektor kehidupan mulai dari agama, Pendidikan, kesehatan, hokum, politik hingga ekonomi. Tegasnya Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan akibatnya jika keadilan tidak di terapkan yaitu akan terjadi perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara manusia. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90)<sup>48</sup>

Dalam masalah ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menggunakan sumber daya ekonomi.

<sup>47</sup> Ibid., 150.

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 16 : 7.

Akibatnya, setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah dan Pendidikan. Untuk itu, negara harus mengatur penggunaan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat didistribusikan secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang tertindas untuk hak-haknya, baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk di sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar ke masyarakat. Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pemerataan kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

## 2) Prinsip solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar yaitu:

- a) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah.
- b) Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya.
- c) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya tersebar di kalangan orang-orang kaya saja.
- d) Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain.

- e) Anjuran untuk mendahulukan distribusi harus kepada orang-orang yang menjadi tanggungan lalu kepada masyarakat.
- f) Anjuran supaya distribusi disertai menggunakan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat, serta larangan berlebihan (boros) dalam distribusi ekonomi pada kalangan masyarakat.<sup>49</sup>

#### d. Saluran Distribusi

Saluran distribusi yaitu perantara perdagangan yang melakukan kegiatan menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen, mulai dari distributor, pedagang besar, sampai pengecer. Peranan saluran distribusi ini penting karena pada umumnya tidak semua barang dapat dikonsumsi secara langsung oleh pemakai. Saluran distribusi dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Saluran langsung

Ketika produsen berhubungan langsung dengan pelanggan, perantara pemasaran disertakan, situasi inilah yang disebut dengan saluran langsung. Jadi saluran langsung ialah penyaluran barang yang dilakukan tanpa pihak ketiga atau tanpa perantara. Saluran langsung ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu:

- a) Perbedaan antara biaya produksi dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen pada produsen

---

<sup>49</sup> Ibid., 153-154.

- b) Produsen bisa mendapatkan masukan atas produk secara langsung dengan mudah

Sedangkan kerugian yang dimiliki saluran langsung yaitu:

- a) Dalam saluran langsung produsen membutuhkan karyawan yang lebih banyak
  - b) Kemungkinan produsen harus menjual produknya secara kredit.
- 2) Saluran satu tingkat

Saluran satu tingkat merupakan perantara pemasaran antara produsen dan konsumen, jadi bisa diartikan bahwa saluran satu tingkat ialah penjualan yang menyertakan pihak lainnya seperti pengecer atau grosir yang menjual pada konsumen. Misalnya produk makanan.

- 3) Saluran dua tingkat

Saluran dua tingkat adalah adanya dua perantara antara produsen dan konsumen. Misalnya, jika produsen menjual produk ke pedagang grosir untuk dijual ke konsumen, maka grosir tidak menjual langsung ke konsumen tetapi grosir menjualnya terlebih dahulu ke pengecer lalu dari pengecer menjual ke konsumen. Misalnya produk minyak, beras dan barang sembako lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Jef Madur, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 127.

e. Strategi Distribusi

Suatu perusahaan harus mempunyai strategi distribusi yang bagus agar penyaluran barang ke konsumen lebih efisien dan efektif. Gunakan strategi distribusi sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) *Distribution intensive*, yaitu pendistribusian produk melalui berbagai saluran (grosir dan pengecer)
- 2) *Distribution eksklusif*, yaitu hak khusus yang diberikan oleh produsen untuk menjual atau menyalurkan produk tertentu kepada pedagang besar (grosir) atau pengecer di wilayah tertentu
- 3) *Distribution selektif*, yaitu pendistribusian melalui grosir dan pengecer tertentu yang memberikan perhatian khusus pada produk tertentu dalam penjualan, manfaat penyajian, dan lain-lain.

f. Distribusi pendapatan dalam Islam

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.<sup>52</sup> Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Distribusi

<sup>51</sup> Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), 222.

<sup>52</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 131.

dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu:

1) Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan perbuatan kedzaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral tersebut. Disinilah diperlukan pembumian etika ekonomi, menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian.

2) Kebebasan

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut al-Qardhawi pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi islam. Namun, sesungguhnya kebebasan yang disyariatkan Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid., 135.

Upaya untuk mengeliminasi kesenjangan pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta bagi pihak *surplus* (yang berkecukupan) merupakan intensif bagi pihak *deficit* (pihak yang kekurangan). Islam menawarkan konsep optimalisasi proses distribusi dan redistribusi pendapatan. Konsep ini menurut bantuan otoritas dari pemerintah (negara) yang sangat bergantung pada ketaatan personal (rumah tangga) maupun masyarakat muslim. Adapun sector-sektor distribusi pendapatan terbagi pada tiga bentuk, yakni:

1) Distribusi pendapatan sektor rumah tangga

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga tidak terlepas dari shadaqah. *Pertama*, shadaqah wajibah artinya bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berarti lewajiban seseorang sebagai muslim dengan muslim lainnya, seperti:<sup>54</sup>

- a) Nafkah, merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan.
- b) Zakat, yakni kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>54</sup> Ibid., 137.

- c) Warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya.

*Kedua*, shadaqah nafilah (sunnah) yang artinya bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunah, seperti:<sup>55</sup>

- a) Infak, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan rumah tangganya sudah melebihi batas kebutuhan dasarnya.
- b) Aqiqah, yakni kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkannya, satu ekor untuk anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki-laki.
- c) Wakaf, yakni menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

*Ketiga*, hudud (hukuman) adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:<sup>56</sup>

- a) *Kafarat*, yakni tebusan terhadap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, misalnya melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan. Salah satu pilihan dari hukuman

---

<sup>55</sup> Ibid., 137.

<sup>56</sup> Ibid., 137.



yang diberikan adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang.

- b) *Dam/diyat*, yakni tebusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji.
- c) *Nazar*, yakni perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah atas keberhasilan mencapai sesuatu yang menjadi keinginannya.

## 2) Distribusi pendapatan sektor negara

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara terkait dengan penjaminan level minimum kehidupan bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia.<sup>57</sup> Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata dan lain sebagainya. Negara juga bertanggung jawab

---

<sup>57</sup> Ibid., 139.

atas manajemen kepemilikan publik yang pemanfaatannya diarahkan untuk seluruh anggota masyarakat.

Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu saja. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan dan pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata.<sup>58</sup> Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dan mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak pendapatan BUMN dan sebagainya. Di samping itu, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara misalnya, pemberian subsidi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan politik ekonomi Islam juga melayani kesejahteraan materil dan kebutuhan spiritual.

---

<sup>58</sup> Ibid., 139.

### 3) Distribusi pendapatan sektor industri

Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa.<sup>59</sup> Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pihak pemodal (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil. Sedangkan musyarakah merupakan kerja sama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan berhimpunnya beberapa pemodal dalam mendirikan suatu perusahaan akan memberikan peluang kepada masyarakat menjadi tenaga kerja pada perusahaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pendapatan dalam bentuk upah/gaji. Di samping itu, rumah tangga yang mempunyai lahan ataupun bangunan yang digunakan perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk sewa.

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Secara umum sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Adapun tujuan

---

<sup>59</sup> Ibid., 140.

distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada:<sup>60</sup>

- a) Tujuan dakwah, dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat.
- b) Tujuan pendidikan, secara umum tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan *akhlak al-karimah* seperti memberi, berdermawan dan mengutamakan orang lain.
- c) Tujuan sosial, dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.
- d) Tujuan ekonomi, dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu: pengembangan dan pembersihan harta baik dalam bentuk infak sunah maupun infak wajib, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka, memberi

---

<sup>60</sup> Ibid., 140.

andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi.

### 3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

#### a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai ialah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dan yang dipergunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah yang aksesnya terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.<sup>61</sup> Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.<sup>62</sup> Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang mempunyai akses dan fasilitas yang memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana serta prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, Subsidi Rastra juga dialihkan menjadi

---

<sup>61</sup> Tim Pengendali, *Pedoman Umum Bantuan*, 7.

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, 3.

bantuan sosial yang disebut Bansos Rastra.<sup>63</sup> Dengan demikian, Bantuan Sosial Pangan disalurkan ke setiap kabupaten/kota dalam bentuk non tunai atau natura, yang masih berupa beras. Beberapa kecamatan yang sarana distribusi non tunai tidak memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebusan yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahun 2019, Program BPNT terus diperluas ke kabupaten/kota yang pada 2018 masih melaksanakan Program Bansos Rastra. Besaran manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Rp110.000/KPM/bulan. Bantuan ini tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e- Warong. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT didasarkan pada tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- 2) Pemberian gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi

---

<sup>63</sup> Tim Pengendali, *Pedoman Umum Bantuan*, 3.

- 4) Memberikan pilihan serta kontrol kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan Pangan.<sup>64</sup>

c. Manfaat

Manfaat dari Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketahanan pangan di taraf Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan
- 4) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
- 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada wilayah, khususnya usaha mikro dan kecil pada bidang perdagangan.<sup>65</sup>

d. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus memenuhi prinsip:

- 1) Menyampaikan pilihan serta kontrol pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras serta telur) dan lokasi e-Warong

---

<sup>64</sup> Ibid., 13.

<sup>65</sup> Ibid., 13-14.

- 2) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak mengemas bahan makanan sehingga menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memiliki pilihan dan kontrol terhadap jenis makanan
  - 3) E-Warong bisa membeli perbekalan pangan berasal dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi
  - 4) Bank penyalur bertanggung jawab menyalurkan dana bantuan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak bertugas mendistribusikan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan
  - 5) Promosi ritel kepada masyarakat untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penghasilan dengan menyediakan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - 6) Akses layanan keuangan untuk usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
  - 7) Pemerintah pusat dan daerah mengawasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan pedoman umum dan pedoman teknis yang berlaku.<sup>66</sup>
- e. Instrumen pembayaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

---

<sup>66</sup> Ibid., 14-15.



Alat pembayaran yang digunakan sebagai sarana penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai *voucher* elektronik, sehingga saat pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) KPM wajib membawanya. Kartu ini menyimpan nilai sejumlah manfaat bantuan pangan yang diberikan. Dalam hal ini tak dipergunakan di bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang. Pada KKS tertulis nama pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan. KKS dan pin tidak bisa disimpan oleh pihak ketiga selain KPM. Bila ditemukan permasalahan KKS yang hilang maka prosedur penyelesaian dilakukan sebagai berikut:

- 1) KPM BPNT melaporkan masalah KKS yang hilang pada Bank Penyalur atau Dinas Sosial setempat, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kantor Kepolisian Republik Indonesia. Bank dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Staf Pelaksana BPNT buat menyampaikan laporan tentang data KKS KPM yang hilang atau jika diharapkan informasi lain yang diperlukan
- 2) Dinas Sosial Kabupaten/Kota melaporkan permasalahan KKS secara tertulis kepada tempat kerja cabang Bank Penyalur dengan tembusan pada Kementerian Sosial (Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerjanya sebagai KPA),

diberikan data menggunakan nama dan alamat KPM, nomor rekening, dan nomor KKS, serta melampirkan surat keterangan hilang dari kantor Kepolisian Republik Indonesia

- 3) Tempat kerja cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis serta mengubah KKS yang hilang kepada KPM paling lambat 14 hari kerja dengan biaya sebesar Rp15.000 per kartu yang dibebankan kepada KPM BPNT
- 4) Jika KKS pengganti sudah tersedia di tempat kerja cabang Bank Penyalur, kantor cabang Bank Penyalur menginformasikan hal tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang akan dikirim ke KPM pada hari tersebut untuk menghubungi kantor cabang Bank Penyalur
- 5) Pada hal KPM penyandang disabilitas serta lanjut usia, pelaporan kehilangan KKS bisa dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu KK serta didampingi oleh Tenaga Pelaksana BPNT dengan membawa identitas asli dan surat kuasa dari KPM diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. Dalam hal tidak ada anggota keluarga lain yang hadir, maka dapat dilakukan oleh tenaga Pelaksana BPNT dengan memberikan dokumen persyaratan yaitu: Identitas asli dan Surat Keputusan Penetapan menjadi pendamping sosial
- 6) KPM mendatangi kantor cabang Bank Penyalur untuk menerima penggantian KKS, memenuhi persyaratan administrasi serta

melakukan aktivasi penggantian KKS. Bagi KPM BPNT yang juga penerima PKH, perlu dipastikan KKS pengganti mampu berfungsi buat PKH juga, bukan hanya untuk BPNT. Dalam hal KPM penyandang disabilitas serta lanjut usia, anggota keluarga dalam satu KK bisa mengambil KKS dan didampingi oleh Tenaga Pelaksana BPNT dengan membawa identitas asli dan surat kuasa dari KPM diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. Dalam hal tidak ada anggota keluarga lainnya, maka dapat dilakukan oleh Tenaga Pelaksana BPNT dengan menyampaikan dokumen persyaratan yaitu: identitas asli dan Surat Keputusan penetapan sebagai pendamping sosial

- 7) Kantor cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan kantor pusat Bank Penyalur
- 8) Dinas Sosial Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis penyelesaian KKS hilang kepada Kementerian Sosial (Direktur yang membidangi pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku KPA)
- 9) Bank Penyalur di pusat melaporkan secara tertulis penyelesaian KKS hilang ke Kementerian Sosial (Direktur yang membidangi pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku KPA)<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid., 74-77.

f. Permasalahan pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai

Adapun permasalahan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai, yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Adanya KKS yang rusak/hilang
- 2) KPM tidak menerima saldo di KKS nya ketika melakukan pembelian di E-Warong
- 3) Tidak semua KPM memahami prosedur penggantian PIN yang terblokir/hilang/lupa

g. Standar Operasional Prosedur

Gambar 2.1  
Standar Operasional Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Masyarakat tidak mampu	Dinas Sosial PPKB	Penerima manfaat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laporan Data By Name By Address	Mulai			Data By NIK			
2	Sinkronisasi Data ke Aplikasi Smart Kampung		Hasil sinkron data		Data By NIK	1 jam		
3	Verifikasi Data Layak Menerima Bantuan/Tidak		Verifikasi data		Data By NIK	3 jam	Data Valid	
4	Distribusi sembako kepada KPM			Distribusi		12 jam	Paket sembako	

Sumber : Data Kecamatan Kabat

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan atas beberapa tahap, yaitu

<sup>68</sup> Ibid., 50.

mulai mendata masyarakat yang tidak mampu menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Selanjutnya data dilakukan sinkronisasi ke dalam aplikasi smart kampung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Pada prosesnya waktu sinkronisasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam kerja. Pada tahap selanjutnya data yang telah masuk ke aplikasi smart kampung dilakukan verifikasi data bagi masyarakat yang layak menerima bantuan atau tidak layak menerimanya, verifikasi tersebut juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial namun pada prosesnya membutuhkan waktu 3 jam kerja sehingga mendapatkan data yang valid. Tahap akhir pada prosedur penerimaan bantuan adalah pendistribusian bahan pangan atau sembako kepada penerima manfaat bagi mereka yang memiliki data yang valid.

#### 4. E-Warung

##### a. Pengertian

Elektronik Warung (E-Warung) ialah agen bank, pedagang atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur serta ditunjuk oleh KPM untuk tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yakni usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, serta usaha eceran lainnya.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang

---

<sup>69</sup> Ibid., 8.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, elektronik warung (E-Warong) ialah agen bank, pedagang atau pihak lain yang sudah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditunjuk sebagai acuan atau tempat penarikan serta pembelian Bantuan Sosial yang ditentukan oleh penerima Bantuan Sosial Bersama bank penyalur.

b. Kriteria E-Warong

Pelaksanaan BPNT di daerah mengetahui nomor KPM di setiap desa/kelurahan dari Kementerian Sosial, mereka mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk menjadi E-Warong untuk mendistribusikan BPNT. Penetapan E-Warong secara keseluruhan menjadi tanggung jawab Bank Penyalur dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk memiliki reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) diuji sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur
- 2) Sumber pendapatan yang utama dari usaha usaha yang sedang berjalan dengan tempat usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya
- 3) Menjual beras dan telur sesuai harga pasar
- 4) Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Dapat diandalkan untuk memasok produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang bersaing kepada E-Warong

- b) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada E-Warong
  - c) E-Warong bisa bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan bahwa harga, kualitas serta jumlah pasokan beras dan telur terjamin serta memenuhi prinsip BPNT.
- 5) Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan memanfaatkan infrastruktur perbankan
  - 6) Memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan khusus bagi KPM lanjut usia serta KPM penyandang disabilitas
  - 7) Setiap perorangan atau badan hukum dapat menjadi e- Warong yang melayani BPNT, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana BPNT
  - 8) Sedangkan untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak dapat menjadi pemasok atau distributor BPNT.<sup>70</sup>

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi E-Warong yang melayani BPNT, Bank Penyalur menerbitkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait BPNT yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan E-Warong.

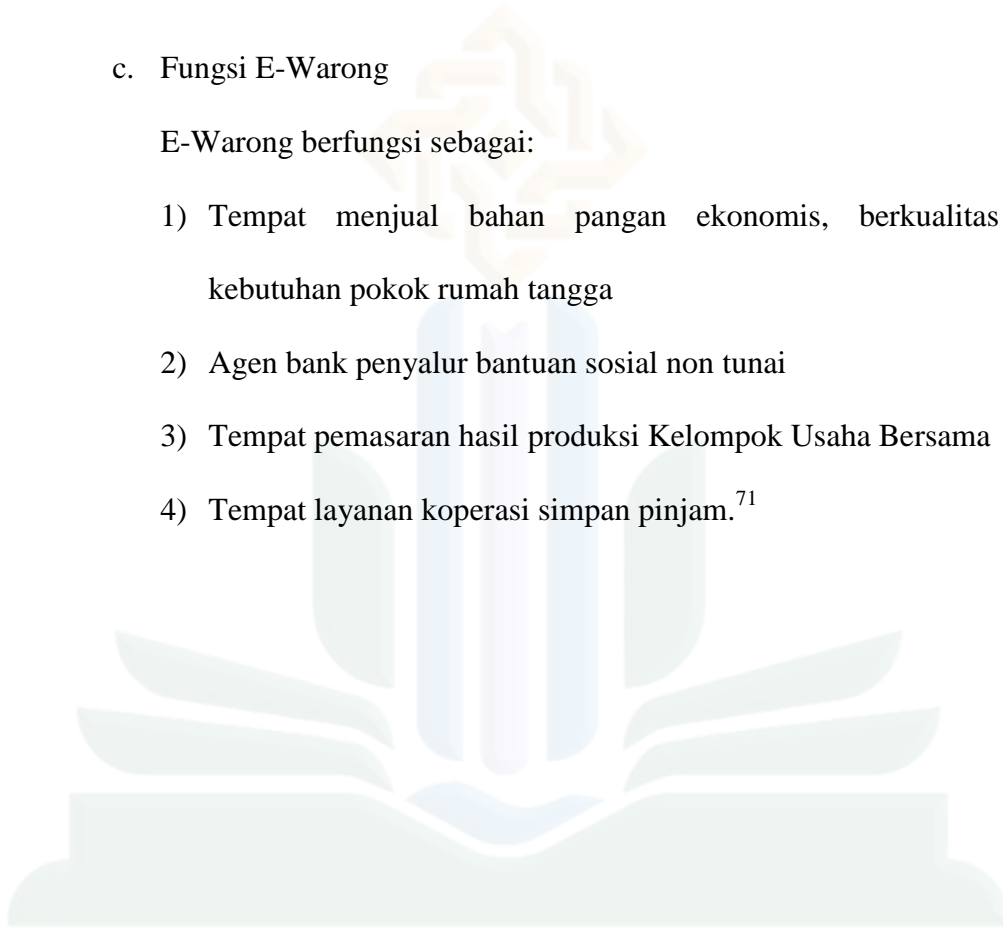
---

<sup>70</sup> Ibid., 38-40.

c. Fungsi E-Warong

E-Warong berfungsi sebagai:

- 1) Tempat menjual bahan pangan ekonomis, berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga
- 2) Agen bank penyalur bantuan sosial non tunai
- 3) Tempat pemasaran hasil produksi Kelompok Usaha Bersama
- 4) Tempat layanan koperasi simpan pinjam.<sup>71</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>71</sup> Ibid., 44.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari bentuk penelitian ilmiah melalui alat-alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian membahas konsep-konsep teoritis dari berbagai metode, kelebihan dan kelemahan dalam suatu karya ilmiah. Kemudian beralih ke pemilihan metode yang akan digunakan kemudian dalam penelitian.<sup>72</sup> Metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah diajukan dengan pemilihan metode yang digunakan. Sedangkan metode penelitian secara teknis menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.<sup>73</sup> Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menemukan jawaban dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih jenis penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap, meringkas berbagai kondisi, situasi dari

---

<sup>72</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 3.

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

berbagai data yang dikumpulkan mengenai hasil wawancara atau pengamatan yang diteliti yang terjadi di lapangan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Daerah penelitian biasanya berisi lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya).<sup>74</sup> Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Desa Tambong menjadi alasan peneliti karena Desa Tambong adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Kecamatan Kabat. Desa Tambong terletak sejauh 5 km dari jalan raya Kabat. Desa Tambong merupakan salah satu desa yang menerima program Bantuan Pangan Nontunai. Ada 223 keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut. Mekanisme pembagian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan prosedur E-Warong. Pembelian barang dilaksanakan setelah Keluarga Penerima Manfaat menerima Bantuan Pangan Non Tunai senilai Rp 200.000. Bantuan Pangan Non Tunai tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan yaitu seperti beras dan telur dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera di E-Warong. E-Warong adalah agen Bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank penyalur dan ditetapkan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial.

---

<sup>74</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 46.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dipilih dengan cara *purposive* yaitu peneliti menentukan subyek penelitian dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga teknik ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan subyek penelitian *snowball* karena Bapak Agus selaku kepala desa menyarankan Ibu Norma sebagai informan selanjutnya. Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut

1. Bapak Agus Hermawan selaku Kepala Desa Tambong lalu merekomendasikan Ibu Norma selaku pemilik E-Warong
2. Bapak Mugis selaku Kesra Desa Tambong
3. Bapak Karsono selaku Pendamping BPNT
4. Ibu Istiharoh dan Ibu Masitah selaku penerima Bantuan Pangan Nontunai

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menghimpun dan memperoleh data yang tepat dan valid.

Peneliti memilih dan mencari di mana sumber data berbeda. Oleh karena itu peneliti harus mampu menentukan dengan cepat dan tepat di mana sumber data dapat diperoleh dengan jalan menggunakan metode yang ada. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data, antara lain: metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## 1. Observasi

Menurut Nasution dalam buku yang dikutip Sugiyono ia menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari segala ilmu. Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui pengamatan.<sup>75</sup>

Menyimpulkan dari pengertian di atas bahwasannya observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Data yang didapat melalui observasi terdiri dari pemberian rincian tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan intraksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati dalam kegiatan tersebut.<sup>76</sup>

Teknik observasi yang dilakukan antara lain:

- a. Letak geografis Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
- b. Lokasi pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai
- c. Proses pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 226

<sup>76</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2007), 66.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>77</sup> Situasi wawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat wawancara. Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat dapat menjadikan pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai dan informanpun tidak ada keinginan untuk menjawab pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tipe wawancara bebas terpimpin, wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam praktiknya, pewawancara membawa panduan yang hanya berupa garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Mengenai efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
  - b. Mengenai kendala distribusi Bantuan Pangan Non Tunai tersebut.
  - c. Mengenai solusi dari kendala distribusi Bantuan Pangan Non Tunai tersebut.
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>78</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi

---

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 240.

pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode dokumenter digunakan untuk memperoleh data:

- a. Profil Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
- b. Struktur petugas pendistribusi Bantuan Pangan Non Tunai.
- c. Data penerima Bantuan Pangan Non Tunai.
- d. Dokumen-dokumen yang diperlukan.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai dari sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai dari perumusan dan penjelasan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlanjut hingga penyusunan hasil penelitian.<sup>79</sup> Analisis data adalah proses penelitian sistematis dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, proses ke dalam unit-unit, mensintesis menyusun model dengan memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Pada tahap ini seluruh data yang diperoleh dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dikumpulkan, dijelaskan dan kemudian dianalisis dengan argumen logis yang

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 333.

dijelaskan dalam kata-kata atau kalimat.<sup>80</sup> Miles dan Huberman mengemukakan agar aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan akan terus berlanjut hingga selesai. Kegiatan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan *verification/* penarikan kesimpulan. Analisis menurut Miles dan Huberman, dibagi dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data terjadi dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, teks yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan simpulan

Temuan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah dipelajari menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 2014), 202.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 247.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau untuk membandingkannya dengan data. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengkaji data informan yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda. Data dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.<sup>82</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas data. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat divalidasi apabila jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan objek yang diteliti.<sup>83</sup> Validitas merupakan suatu alat pengukur, suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur itu mengukur apa yang sebenarnya diukur oleh alat itu. Artinya, validitas data adalah merupakan data yang telah terkumpul dan dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.<sup>84</sup> Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui metode dan sumber perolehan

---

<sup>82</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 363.

<sup>84</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 167.



data. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.<sup>85</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

### 1. Tahap pra lapangan

Pada tahap awal ini, ada enam langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

#### a. Menyusun rancangan penelitian

Rencana penelitian ini dimulai dengan pengajuan judul, menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal hingga seminar proposal

#### b. Memilih lapangan penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi tersebut disertai dengan beberapa alasan, seperti yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya yaitu pada topik lokasi penelitian.

#### c. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan pertama terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal untuk memulai penelitian yang dilakukan.

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 369.

d. Memilih dan memanfaatkan informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan judul diantaranya:

- 1) Bapak Agus Hermawan selaku Kepala Desa Tambong, lalu ke Ibu Norma selaku pemilik E-Warong
- 2) Bapak Mugis selaku Kesra Desa Tambong
- 3) Bapak Karsono selaku Pendamping BPNT Kecamatan Kabat
- 4) Ibu Istiharoh dan Ibu Masitah selaku penerima Bantuan Pangan Nontunai

2. Tahap pekerjaan lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan, peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya.

3. Tahap analisis data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisis data sesuai dengan teknik analisis yang dipergunakan, yaitu analisis deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Tambong

Tambong adalah nama salah satu desa di Kecamatan Kabat, dan juga termasuk desa tua di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tambong adalah salah satu desa yang pemimpinnya ikut Bersama Mas Rempeg (Jogopati) di Perang Bayu untuk mengusir VOC Belanda pada tahun 1771-1772. Dalam Kamus Bahasa Using Hasan Ali, kata Tambong diartikan sebagai salah satu jenis bambu, yakni bambu tambong. Dahulu, saat pertama kali pemuka desa melakukan babat alas, di Tambong banyak ditemukan tumbuhan bambu jenis ini. Bambu-bambu ini kemudian dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan juga untuk mendirikan sarana umum lainnya. Di Desa Tambong ini terdiri dari 3 dusun, yaitu:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Kejoyo
- c. Dusun Kebonsari

Tabel 4.1  
Struktur Kantor Desa Tambong dan Jabatannya.

No	Nama	Jabatan
1	Agus Hermawan, S. Sos.	Kepala Desa
2	Abdul Basis	Sekertaris Desa
3	Diah Ayu Ningsih	Kepala Urusan Keuangan
4	Nanang Fauzi, S.S	Kepala Urusan Perencanaan
5	Pudjo Mustain	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Abdul Mugis	Kepala Seksi Kesejahteraan
7	Agus Prastyo Hadi	Kepala Urusan Umum

8	Dewi Ayu Lestari	Kepala Seksi Pelayanan
9	Erdith Dwiki Kuncoro	Staff Desa
10	Siska Dwi Hidayati	Staff Desa
11	Siti Aminah	Staff Desa
12	Abdul Ajis	Kepala Dusun Krajan
13	Ahmad Khoirul	Kepala Dusun Kejoyo

Sumber data: Struktur organisasi Desa Tambong 2020

## 2. Letak Geografis Desa Tambong

Secara geografis Desa Tambong adalah desa dengan Kawasan pertanian, dan perkebunan. Di Desa Tambong ini didominasi oleh lahan pertanian seperti sawah padi dan kebun buah seperti papaya, pisang, kelapa dan salak. Adapun total luas sawah 29,45 Ha, total luas perkebunan 35,29 Ha, luas tanah kering 19,11 Ha, luas fasilitas umum 464,35 Ha, luas tanah hutan 28 Ha, sehingga jumlah total luas wilayah Desa Tambong adalah 576,20 Ha. Jarak dari Desa Tambong ke Kecamatan Kabat 5 Km.

Batas wilayah Desa Tambong:

- a. Sebelah Barat : Desa Gumuk Kecamatan Licin
  - b. Sebelah Timur : Desa Kedayunan Kecamatan Kabat
  - c. Sebelah Selatan : Desa Macanputih Kecamatan Kabat
  - d. Sebelah Utara : Pendarungan Kecamatan Kabat
- ## 3. Demografi Desa Tambong

Tabel 4.2  
Jumlah penduduk

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1.653	1.681
Jumlah penduduk tahun lalu	1.668	1.677
Presentase perkembangan	-0,9%	0,24%

Sumber data : *Profil Desa Tambong 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tambong mengalami peningkatan yang sedikit. Bahkan untuk penduduk laki-laki mengalami penurunan. Tahun lalu jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.668 orang sedangkan tahun ini berjumlah 1.653, mengalami penurunan sejumlah 15 orang. Lain halnya dengan penduduk perempuan yang mengalami peningkatan, pada tahun lalu berjumlah 1.677 orang dan pada tahun ini berjumlah 1.681 orang, mengalami peningkatan 4 orang.

Tabel 4.3  
Potensi Sumber Daya Manusia dari Berbagai Aspek

No	Uraian Aspek	Laki-laki	Perempuan
Kualitas Angkatan Kerja			
1	Penduduk yang buta aksara dan angka latin	53	145
2	Penduduk yang tidak tamat SD	132	150
3	Penduduk yang tamat SD	500	424
4	Penduduk yang tamat SMP	200	170
5	Penduduk yang tamat SMA	125	70
6	Penduduk yang tamat Perguruan Tinggi	26	20
Tenaga Medi dan Paramedis			
1	Bidan		4
2	Perawat	1	
3	Dukun Bayi	-	-

Sumber: *Profil Desa Tambong 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Tambong cukup banyak. Dari aspek tingkat pendidikan yang masih buta aksara berjumlah 198 orang. Sedangkan angkatan kerja yang sesuai dengan jenjang pendidikannya berjumlah 1.817 orang. Tenaga medis yang ada di Desa Tambong ada 5 orang. Masyarakat Desa Tambong

mayoritas bekerja sebagai petani dan kuli batu karena faktor kualitas pendidikan, mayoritas masyarakat hanya lulusan SD.

Tabel 4.4  
Berikut adalah tabel kesejahteraan keluarga

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1	Jumlah Keluarga Prasejahtera	421
2	Jumlah Keluarga Sejahtera 1	350
3	Jumlah Keluarga Sejahtera 2	275
4	Jumlah Keluarga Sejahtera 3	150
5	Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus	19
		1.215

Sumber: *Profil Desa Tambong 2020*

Berikut jumlah data penerima BPNT di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 4.5  
Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambong

No	Dusun	Jumlah Penerima BPNT
1	Krajan	102
2	Kejoyo	92
3	Kebonsari	29
		223

Sumber: *Data Penerima BPNT Desa Tambong 2020*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada banyak keluarga prasejahtera, ada 421 keluarga. Keluarga sejahtera 1 ada 350 keluarga, keluarga sejahtera 2 ada 275 keluarga, keluarga sejahtera 3 ada 150 keluarga dan keluarga sejahtera 3 plus ada 19 keluarga. Di Desa Tambong ini jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai ada 223 keluarga. Bantuan ini diberikan setiap 1 bulan sekali. Dengan adanya BPNT ini diharapkan bisa membantu keluarga penerima manfaat.

## B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah, sebagai berikut:

1. Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, maka akan dipaparkan tiga macam data yaitu data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara mendalam dan kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan pada rumusan masalah.

Adapun dalam penelitian ini peneliti berusaha memaparkan hasil penelitiannya tentang efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan selaku Kepala Desa Tambong.

“Di desa Tambong ini ada banyak macam Bantuan Sosial salah satunya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Saya sebagai Kepala Desa Tambong juga ikut mengawasi pendistribusian Bantuan Pangan Nontunai. Bantuan ini di salurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap 1 bulan sekali. Nah untuk pendistribusiannya ini kami bekerjasama dengan E-Warong,

yang mana warong ini sudah mendapatkan ijin dari Kepala Desa dan sudah di pilih oleh Bank BTN selaku Bank yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Untuk E-Warong di Desa Tambong ini hanya ada satu yaitu di warong Ibu Norma. Setiap pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai kami di damping oleh Babinkamtibmas dan juga pendamping BPNT dari kecamatan. Hal ini dilakukan agar penyaluran terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman penyaluran BPNT”<sup>86</sup>

Efektivitas adalah kemampuan yang dilakukan berdasarkan indikator tertentu dalam mencapai tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun indikatornya adalah:

1) Tepat sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karsono selaku pendamping BPNT Kecamatan Kabat menjelaskan bahwa:

Adapun Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambong ini sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Sosial Banyuwangi atau dari pusat. Jadi yang mendapatkan bantuan memang benar-benar orang yang berhak menerima bantuan<sup>87</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mugis selaku Kesra di Desa Tambong, yaitu:

Bantuan ini sudah tepat sasaran karena yang mendapatkan bantuan ini memang orang yang tidak mampu kebanyakan dari golongan lansia dan masyarakat yang penghasilannya minim.<sup>88</sup>

Begitu juga Ibu Masitah selaku KPM menyampaikan hal yang serupa, yaitu:

Saya di rumah hidup sendiri mbak, kerjaan saya cuma buruh nyuci baju 1 bulan upahnya Rp. 300.000. Untung saja tiap bulan saya

<sup>86</sup> Agus Hermawan, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

<sup>87</sup> Karsono, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

<sup>88</sup> Mugis, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021



dapat sembako dari BPNT jadi saya tidak perlu beli beras, tinggal beli lauk pauknya saja<sup>89</sup>

Dari beberapa paparan yang disampaikan informan, maka dapat disimpulkan bahwa program BPNT di Desa Tambong ini sudah tepat sasaran, karena masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tergolong pada Keluarga Prasejahtera.

## 2) Tepat kualitas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Karsono selaku pendamping BPNT Kecamatan Kabat menjelaskan bahwa:

Belum ada masyarakat yang mengeluh masalah beras karena memang beras yang dibagikan oleh E-Warong itu beras berkualitas. Bukan beras yang tidak layak untuk dimakan.<sup>90</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Norma selaku pemilik E-Warong, yaitu:

Beras yang saya beli untuk KPM adalah beras yang kualitasnya bagus. Selama saya menjadi agen E-Warong tidak ada KPM yang protes masalah beras yang tidak layak untuk dimakan.<sup>91</sup>

Begitu juga dengan pernyataan Ibu Istiharoh selaku KPM, yaitu:

Setiap bulan saya mendapatkan bantuan berupa bahan pangan beras, telur, kacang hijau, dan buah. Alhamdulillah beras bantuan ini kualitasnya bagus, ketika saya masak rasanya juga enak seperti beras biasanya yang saya beli.<sup>92</sup>

Dari hasil ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan, kualitas beras dan telur yang didistribusikan kepada KPM telah memenuhi standar dan E-Warong memberikan kualitas yang terbaik sesuai dengan jumlah

---

<sup>89</sup> Masitah, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>90</sup> Karsono, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

<sup>91</sup> Norma, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

<sup>92</sup> Istiharoh, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

bantuan. Jadi beras tersebut layak untuk dikonsumsi KPM. Selain beras KPM juga mendapatkan telur, buah dan kacang.

### 3) Tepat jumlah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Istiharoh selaku KPM menjelaskan bahwa:

Besarnya Bantuan Pangan Non Tunai yang kami terima setiap bulannya senilai Rp. 200.000 nantinya akan kami cairkan dalam bentuk bahan pangan berupa beras 15 kg, telur  $\frac{3}{4}$  kg, buah  $\frac{3}{4}$  kg dan kacang hijau  $\frac{1}{4}$  kg. alhamdulillah mbak dengan adanya bantuan ini sangat meringankan saya untuk mengurangi pengeluaran tiap bulannya.<sup>93</sup>

Ibu Norma selaku pemilik E-Warong menjelaskan bahwa:

Bantuan yang kami distribusikan tiap bulannya jika dalam bentuk uang itu senilai Rp. 200.000. Nantinya dengan uang Rp. 200.000 itu KPM mendapatkan beras, telur, buah dan kacang. Saya tidak pernah mengurangi jatah beras, karena kalau beras itu tiap bulannya pasti dapat 15 kg. kalau untuk telur, buah dan kacang itu menyesuaikan karena harganya kan naik turun mbak, saya sesuaikan dengan harga di pasar.<sup>94</sup>

Ibu Masitah juga mengatakan hal serupa, yaitu:

Saya sangat senang mbak karena dapat bantuan ini, tiap bulannya saya tidak usah bingung beli beras. Kalau saya dengan beras 15 kg itu sudah cukup untuk 1 bulan mbak. Malah kadang beras belum habis udah dapat lagi.<sup>95</sup>

Dari pemaparan di atas keluarga penerima manfaat mendapatkan Bantuan senilai Rp. 200.000 tiap bulannya. Yang mana uang ini tidak bisa diambil secara tunai, hanya bisa diambil dengan cara melakukan pembelian di E-Warong. Dengan bantuan senilai Rp. 200.000 KPM akan mendapatkan beras 15 kg, telur  $\frac{3}{4}$  kg, buah  $\frac{3}{4}$  kg dan kacang hijau  $\frac{1}{4}$  kg.

<sup>93</sup> Istiharoh, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>94</sup> Norma, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>95</sup> Masitah, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

#### 4) Tepat harga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku pemilik E-Warong menjelaskan:

Harga yang saya berikan kepada KPM sesuai dengan harga pasar. Jika harga telur turun makan jumlah telur yang saya berikan akan bertambah dan sebaliknya jika pada saat pendistribusian harga telur naik maka bisa saja telur yang saya berikan akan berkurang dari biasanya. Kalau untuk beras tiap bulannya sudah pasti 15kg. Untuk buah dan kacang hijau itu menyesuaikan pokoknya pembelanjaan sesuai dengan nominal bantuan yaitu Rp. 200.000. Tapi tiap bulannya sudah pasti mendapatkan beras, telur, buah dan kacang. Saya tidak meminta uang tambahan kepada KPM karena saya sudah mendapatkan laba dari pembelian mereka.<sup>96</sup>

Jumlah yang dibayarkan oleh KPM ke E-Warong senilai Rp. 200.000, dan juga pihak E-Warong tidak meminta uang tambahan. Hal ini diperkuat dengan wawancara Ibu Istiharoh selaku Keluarga Penerima Manfaat

Selama saya mendapatkan BPNT ini Mbak Norma selaku pemilik E-Warong tidak pernah menjual bahan pangan dengan harga lebih mahal, malah menurut saya lebih murah dibanding dengan toko lain. Setiap bulannya kan saya mendapatkan bantuan Rp. 200.000 nah dengan uang Rp. 200.000 itu saya sudah mendapatkan beras, telur, buah dan kacang hijau.<sup>97</sup>

Ibu Masitah juga mengatakan hal yang serupa, yaitu:

Kalau untuk harga mungkin sama seperti di pasar ya mbak. Pokoknya uang 200.000 itu dapat beras 15 kg, telur, buah dan kacang.<sup>98</sup>

Dari ketiga pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa harga yang diberikan oleh E-Warong sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima

<sup>96</sup> Norma, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>97</sup> Istiharoh, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>98</sup> Masitah, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

oleh para KPM. E-Warong juga tidak meminta biaya tambahan kepada KPM.

#### 5) Tepat waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Norma selaku pemilik E-Warong dijelaskan bahwa:

Waktu pendistribusian BPNT ini tepat waktu, misal uang bantuan masuk ke rekening KPM pada tanggal 5 pada hari itu juga KPM bisa datang ke E-Warong untuk proses penggesekan kartu. Lalu akan didata jumlah KPM yang bantuannya sudah terinjec, sehingga saya bisa menyiapkan berapa jumlah bantuan yang harus saya beli untuk diberikan kepada KPM.<sup>99</sup>

Pendistribusian BPNT melalui E-Warong ini dilakukan tepat waktu, hal ini diperkuat dengan wawancara Ibu Istiharoh:

Kalau waktunya menggesek kartu itu pasti ada woro-woro jadi nanti saya langsung ke warong Mbak Norma, lalu saya cek saldo saya sudah masuk apa belum. Kalau mendapatkan saldo langsung saya lakukan pembelian tetapi di data dulu oleh Mbak Norma.<sup>100</sup>

Ibu Masitah juga menyampaikan hal serupa, yaitu:

Saya tidak pernah telat mbak kalau waktunya gesek kartu, pasti tetangga-tetangga langsung ngabari. Kalau saya gak cepet-cepet gesek bisa-bisa bantuan saya tidak tersalurkan tepat waktu.<sup>101</sup>

Dari hasil ketiga wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pendistribusian BPNT dilakukan tepat waktu. Setiap bantuan masuk ke rekening KPM, langsung dilakukan proses penggesekan kartu dengan mendata KPM yang saldonya sudah masuk ke rekening. Sehingga hal ini mempermudah agen E-Warong untuk membeli jumlah bahan pangan yang dibutuhkan.

<sup>99</sup> Norma, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>100</sup> Istiharoh, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>101</sup> Masitah, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

6) Tepat administrasi

Bapak Karsono selaku pendamping BPNT Kecamatan Kabat mengatakan bahwa:

Setelah semua pendistribusian selesai tugas dari pendamping ialah pendamping harus tau KPM membelanjakan bantuannya di mana karena ini bantuan sifatnya non tunai jadi harus dibelanjakan di E-Warong yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Hal ini dilakukan agar KPM mendapatkan bantuan lancar.<sup>102</sup>

Ibu Norma juga mengatakan bahwa:

Dalam hal administrasi kita sudah dapat dikatakan baik karena semua sistemnya online otomatis data yang kita masukkan harus lengkap dan dilampirkan dengan beberapa dokumen pendukung. Setiap bulan kita juga mengupdate status KPM agar segera dilaporkan ke pusat.<sup>103</sup>

Hal senada juga disampaikan Bapak Mugis selaku Kesra Desa Tambong, yaitu:

Kita sudah tertib administrasi mbak semuanya harus lengkap untuk mengganti KPM saja kita harus melengkapi beberapa dokumen seperti muskel dan berita acara, karena kalau tidak lengkap datanya tidak bisa di input.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program BPNT di Desa Tambong sudah tepat administrasi. Setiap data harus *diinput* harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Dari semua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pola distribusi BPNT melalui E-Warong di Desa Tambong secara keseluruhan berdasarkan 6T indikator pengukuran efektivitas adalah efektif. Karena semua indikator terpenuhi, yaitu tepat sasaran, tepat

<sup>102</sup> Karsono, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

<sup>103</sup> Norma, *wawancara*, Banyuwangi 2 November 2021

<sup>104</sup> Mugis, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat administrasi. Dengan terpenuhinya semua indikator diharapkan tujuan dari pendistribusian BPNT ini tercapai. Adapun tujuan dari BPNT yaitu:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
  - b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
  - c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi<sup>105</sup>
2. Kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Hasil wawancara dengan Bapak Mugis selaku Kesra di Desa Tambong:

Untuk saat ini kendala yang terjadi yaitu banyaknya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di putus dari pusat, sedangkan yang di putus bantuannya itu adalah orang-orang yang berhak menerima bantuan. Seperti orang yang lansia mereka banyak yang mempunyai KTP namun belum KTP elektronik, oleh karena itu kita melakukan perbaikan data. Misalkan ini di Tambong ada 300 yang menerima bpnt itu ternyata yang data nya harus ada perbaikan ada sekitar 100 an. Terputusnya bantuan tersebut bisa mengakibatkan saldo dalam kartu KPM itu menjadi Rp. 0, sehingga mengakibatkan KPM tidak bisa mencairkan bantuannya.<sup>106</sup>

Kemudian saya melakukan wawancara dengan Bapak Karsono selaku pendamping BPNT Kecamatan Kabat yang mana hasil wawancara tersebut serupa dengan hasil wawancara di atas, yaitu :

<sup>105</sup> Tim Pengendali, *Pedoman Umum Bantuan*, 13

<sup>106</sup> Mugis, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

Pernah ada kejadian salah satu lansia dia tidak bisa mendapatkan bantuan karena kartunya hilang entah hilang di mana. Sampai satu minggu lebih belum ketemu, jadi lama mbak bantuannya tersalurkan<sup>107</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Masitah selaku penerima BPNT.

Bulan Maret kemarin saat saya menggesek kartu ke E-Warong ternyata saldo saya di kartu tersebut nol (0). Lalu di data oleh Mbak Norma untuk di tindaklanjuti agar bantuan tersebut bisa saya terima. Setelah ditindaklanjuti ternyata ada kesalahan nama di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Setelah dibenahi oleh petugas Desa Tambong saya mencoba mengecek kembali di bulan April alhamdulillah saldo di kartu saya sudah di inject dari pusat dan saya mendapatkan bantuan *double* karena bulan Maret kan saya tidak dapat bantuan<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat narasumber tersebut dapat diketahui kendala yang ada pada pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tambong beberapa di antaranya yaitu para lansia yang belum mempunyai KTP elektronik, ada juga yang terjadi karena kesalahan nama pada penerima sehingga mengakibatkan bantuan di putus dari pusat. Selain itu terdapat kendala berupa kartu yang hilang sehingga KPM mengalami keterlambatan penerimaan bantuan.

### 3. Solusi Kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Hasil wawancara dengan Bapak Karsono selaku pendamping BPNT Kecamatan Kabat:

Setiap pendistribusian kita selalu mantau para KPM, jangan sampai terjadi masalah lalu kita acuh membiarkan KPM begitu saja. Kalau ada masalah KPM harus langsung bilang ke kita mbak, jadi nanti kita berikan arahan ke KPM. Seperti KPM yang bantuannya

<sup>107</sup> Norma, *wawancara*, 2 November 2021

<sup>108</sup> Masitah, *wawancara*, 2 November 2021

terputus dari pusat karena data tidak valid, ini untuk sistem perbaikan datanya itu bisa pakai 2 cara mbak, bisa secara *offline* dan secara *online*. Nah kalau kita memakai perbaikan data secara *online*, jadi datanya itu langsung masuk ke Pusdatin. Perbaikan ini tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus berkoordinasi dengan pihak Desa Tambong. Untuk prosesnya kita memasukkan data KPM dengan benar mbak, tapi kalau perbaikan data yang kita lakukan ini belum benar maka kita lanjutkan prosesnya ke Dukcapil. Kalau biasanya ya mbak data yang tidak benar ini karena kesalahan pada saat pendataan penulisan nama. Lalu untuk KPM yang KTP nya masih belum elektronik kita melakukan pendataan ulang untuk mengubah ke KTP elektronik. Jadi untuk penerima bantuan yang datanya perlu diperbaiki, bantuannya tertahan. Jika nanti data sudah benar mereka mendapatkan bantuan *double*. Misal dari bulan maret dan data valid bulan mei maka di bulan mei mereka mendapat bantuan 3.<sup>109</sup>

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Norma selaku pemilik E-Warong:

Nantinya akan kita data berapa KPM yang kartunya bermasalah. Untuk bulan Maret kemari ada banyak KPM yang tidak *terinjec* saldonya dari pusat. Setelah kita tindaklanjuti ternyata hal tersebut dikarenakan adanya validasi data yang mana data di KTP dan data di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu harus sama. Setelah kita masukan data ke sistem *online* dan datanya valid maka bulan depan orang tersebut bisa datang lagi ke E-Warong untuk mengecek apakah saldo sudah *diinject* dari pusat atau belum. Jika saldo sudah masuk maka KPM tersebut akan mendapatkan bantuan *double*, jadi bantuan yang bulan kemarin tidak tersalurkan maka akan tersalurkan bulan berikutnya saat saldo sudah di inject ke kartu KPM.<sup>110</sup>

Bapak Mugis selaku Kesra Desa Tambong juga mengatakan bahwa:

Begitu mbak kalau untuk penggantian KKS yang hilang itu prosesnya agak lama. Karena harus malaporkan ke bank penyalur dengan menyertakan surat keterangan hilang dari Kantor Kepolisian. Paling lambat itu biasanya 14 hari baru selesai mbak, dan juga ada biayanya sebesar Rp. 15.000. Jadi KPM tersebut tidak

<sup>109</sup> Karsono, wawancara, 1 November 2021

<sup>110</sup> Norma, wawancara, 2 November 2021



bisa mendapatkan bantuan, biasanya mencairkan bantuannya di bulan depan.<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut dapat diketahui beberapa solusi untuk kendala-kendala yang terdapat pada pendistribusian BPNT diantaranya ketika ditemukan data yang tidak valid perbaikan dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline*. Di Desa Tambong perbaikan dilakukan secara *online* dengan melakukan koordinasi antara pendamping BPNT dan petugas Desa Tambong. Perbaikannya dilakukan dengan memasukkan data secara benar dan valid. Untuk solusi masalah KKS yang hilang KPM bisa langsung konfirmasi ke bank penyalur untuk pergantian KKS. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kantor Kepolisian. Proses pergantian KKS paling lambat 14 hari kerja, nantinya KPM akan diberi KKS yang baru.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Dalam distribusi Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat dikatakan efektif apabila sudah memenuhi indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi. Dengan terbatasnya jumlah E-Warong yang ada di Desa Tambong tetapi pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai ini sudah

---

<sup>111</sup> Mugis, *wawancara*, Banyuwangi 1 November 2021

efektif karena indikator 6T sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya indikator 6T tersebut maka tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai ini akan tercapai.

Adapun tujuan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini juga bertujuan untuk:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah harga, kualitas, dan administrasi<sup>112</sup>

Hal ini sama dengan teori tujuan dalam distribusi, yaitu:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan dan minuman, yang mana kebutuhan ini harus terpenuhi.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat agar tidak mengakibatkan perpecahan dalam masyarakat.
- c. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.<sup>113</sup>

Selain itu tujuan sosial dalam distribusi adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat
- b. Mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan masyarakat

<sup>112</sup> Tim Pengendali, *Pedoman Umum Bantuan*, 13.

<sup>113</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, 149.

- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketantraman masyarakat dapat terealisasikan, karena jika distribusi tidak adil maka akan berdampak pada kemiskinan dan kriminalitas
- d. Mewujudkan keadilan di tengah masyarakat.<sup>114</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Karsono, Ibu Norma dan Ibu Istiharoh yang mana pendistribusian BPNT ini sasarannya adalah benar-benar keluarga yang tidak mampu, jumlah yang diberikan sesuai, waktu pendistribusian juga sesuai, kuliatas bahan pangan yang diberikan cukup baik, harga bahan pangan sesuai dengan harga pasar, dan administrasinya baik. Selain itu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan berupa beras 15 kg, telur  $\frac{3}{4}$  kg, buah  $\frac{3}{4}$  kg dan kacang hijau  $\frac{1}{4}$  kg, diharapkan bisa menjadi pemenuhan gizi seimbang untuk KPM. Ibu Istiharoh juga mengatakan bahwa adanya BPNT ini juga membantu meringankan pengeluaran KPM tiap bulannya.

2. Kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa berupa kendala-kendala yang terjadi pada pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai yaitu penerima bantuan merupakan para lansia yang mana mereka belum memiliki KTP elektronik. Dan ada juga kesalahan nama KPM yang mana

---

<sup>114</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 141.

nama di KTP dan KKS tidak sama. Hal ini mengakibatkan pada saat penggesekan kartu tetapi saldonya kosong sehingga KPM tidak bisa melakukan pembelian bahan pangan di E-Warong. Selain itu ada juga KPM yang kehilangan KKS, sehingga KPM harus melakukan konfirmasi ke bank penyalur dan melakukan prosedur sesuai arahan dari bank penyalur.

Hal ini sama dengan teori tentang kendala pemanfaatan BPNT. Adapun kendala dalam pendistribusian BPNT, yaitu:<sup>115</sup>

- 1) Adanya KKS yang rusak/hilang
- 2) KPM tidak menerima saldo di KKS nya ketika melakukan pembelian di E-Warong
- 3) Tidak semua KPM memahami prosedur penggantian PIN yang terblokir/hilang/lupa.

Sedangkan untuk kendala yang mempengaruhi proses pendistribusian BPNT menurut M. Hidayat Panuntun Muslim ada 2, yaitu:<sup>116</sup>

- 1) Faktor internal: adanya keterbatasan baik secara kuantitas maupun kualitas sumber daya dari tenaga pendamping BPNT dalam penyaluran BPNT.

---

<sup>115</sup> Tim Pengendali, *Pedoman Umum Bantuan*, 50

<sup>116</sup> M. Hidayat Panuntun Muslim, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kurangji Kota Padang", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2019), 65-66.

- 2) Faktor eksternal: banyaknya penerima bantuan yang datanya salah, tidak valid, terdapat KPM yang kehilangan KKS dan juga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program BPNT.
3. Solusi Dari Kendala Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Dengan adanya kendala pada saat pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai dapat menghambat proses pendistribusian. Oleh karena itu jika ada masalah pada saat pendistribusian KPM harus segera lapor ke pihak Desa Tambong atau ke Pendamping BPNT Kecamatan Kabat. Setiap pendistribusian bantuan pendamping BPNT harus mengawasi KPM agar pendistribusian berjalan lancar. Untuk saldo yang tidak *terinjec* dari pusat karena data yang tidak sesuai misalnya perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas pendamping BPNT berkoordinasi dengan pegawai desa untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut.<sup>117</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Karsono yang mengatakan bahwa pada bulan Maret kemarin banyak bantuan yang belum tersalurkan karena data yang tidak sinkron, jadi kementerian ingin penerima BPNT itu jelas, NIK nya jelas semua itu terdaftar di Dukcapil. Untuk sistem perbaikan data itu ada 2 cara yaitu secara *offline* dan secara

---

<sup>117</sup> Tim Pengendali, *Pedoman Umum Bantuan*. 62.

*online*. Desa Tambong memakai perbaikan data secara *online*, jadi datanya itu langsung masuk ke Pusdatin. Perbaikan ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkoordinasi dengan pihak Desa Tambong. Nanti kita langsung memasukan data jika data tersebut benar maka valid, namun jika tidak valid maka kita harus menindaklanjuti ke Dukcapil. Jadi untuk penerima bantuan yang datanya perlu diperbaiki bantuannya di pending. Bila ditemukan permasalahan KKS yang hilang maka prosedur penyelesaian dilakukan sebagai berikut:

- a. KPM BPNT melaporkan masalah KKS yang hilang pada Bank Penyalur atau Dinas Sosial setempat, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kantor Kepolisian Republik Indonesia. Bank dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota melalui Staf Pelaksana BPNT untuk menyampaikan laporan tentang data KKS KPM yang hilang atau jika diharapkan informasi lain yang diperlukan
- b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota melaporkan permasalahan KKS secara tertulis kepada tempat kerja cabang Bank Penyalur dengan tembusan pada Kementerian Sosial (Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerjanya sebagai KPA), diberikan data menggunakan nama dan alamat KPM, nomor rekening, dan nomor KKS, serta melampirkan surat keterangan hilang dari kantor Kepolisian Republik Indonesia
- c. Tempat kerja cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis serta mengubah KKS yang hilang kepada KPM paling lambat

14 hari kerja dengan biaya sebesar Rp15.000 per kartu yang dibebankan kepada KPM BPNT

- d. Jika KKS pengganti sudah tersedia di tempat kerja cabang Bank Penyalur, kantor cabang Bank Penyalur menginformasikan hal tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang akan dikirim ke KPM pada hari tersebut untuk menghubungi kantor cabang Bank Penyalur
- e. Pada hal KPM penyandang disabilitas serta lanjut usia, pelaporan kehilangan KKS bisa dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu KK serta didampingi oleh Tenaga Pelaksana BPNT dengan membawa identitas asli dan surat kuasa dari KPM diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/ Kota setempat. Dalam hal tidak ada anggota keluarga lain yang hadir, maka dapat dilakukan oleh Tenaga Pelaksana BPNT dengan memberikan dokumen persyaratan yaitu: Identitas asli dan Surat Keputusan penetapan menjadi pendamping sosial
- f. KPM mendatangi kantor cabang Bank Penyalur untuk menerima penggantian KKS, memenuhi persyaratan administrasi serta melakukan aktivasi penggantian KKS. Bagi KPM BPNT yang juga penerima PKH, perlu dipastikan KKS pengganti mampu berfungsi buat PKH juga, bukan hanya untuk BPNT. Dalam hal KPM penyandang disabilitas serta lanjut usia, anggota keluarga dalam satu KK bisa mengambil KKS dan didampingi oleh Tenaga Pelaksana BPNT dengan membawa identitas asli dan surat kuasa dari KPM diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat. Dalam hal tidak

ada anggota keluarga lainnya, maka dapat dilakukan oleh Tenaga Pelaksana BPNT dengan menyampaikan dokumen persyaratan yaitu: Identitas asli dan Surat Keputusan Penetapan sebagai pendamping sosial

- g. Kantor cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan kantor pusat Bank Penyalur
- h. Dinas Sosial Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis penyelesaian KKS hilang kepada Kementerian Sosial (Direktur yang membidangi pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku KPA)
- i. Bank Penyalur di pusat melaporkan secara tertulis penyelesaian KKS hilang ke Kementerian Sosial (Direktur yang membidangi pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku KPA)<sup>118</sup>

Sedangkan menurut M. Hidayat Panuntun Muslim diperlukan solusi yang tepat sehingga semua kendala bisa diatasi dengan semestinya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu:<sup>119</sup>

- 1) Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai program BPNT harus dilakukan penyuluhan kepada KPM

<sup>118</sup> Ibid., 74-77.

<sup>119</sup> M. Hidayat Panuntun Muslim, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kurangji Kota Padang", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2019), 66.



- 2) Pihak pendamping BPNT melakukan pengawasan kepada KPM sehingga jika terjadi masalah pendamping BPNT bisa langsung memberikan arahan kepada KPM.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Efektivitas Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi sudah efektif. Meskipun dengan jumlah E-Warong yang terbatas pendistribusian dilakukan sesuai dengan indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dengan terpenuhinya 6T tersebut diharapkan tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai tercapai.
2. Kendala pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah yaitu saldo tidak *terinjec* dari pusat karena data yang tidak sinkron sehingga KPM tidak bisa melakukan pembelian bahan pangan ke E-Warong, dan ada juga yang kartunya hilang. Ada 50% KPM yang datanya harus divalidasi karena tidak sinkron sehingga menyebabkan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai terhambat.
3. Solusi dari kendala yang terjadi yaitu adanya data yang tidak sinkron dan adanya kartu yang hilang harus segera dilaporkan ke pegawai desa atau pendamping BPNT agar segera di tindaklanjuti. Untuk sistem perbaikan data itu ada 2 cara yaitu secara *offline* dan secara *online*. Di Desa Tambong memakai perbaikan data secara *online*, jadi datanya itu langsung masuk ke Pusdatin. Nanti pihak pegawai desa dan pendamping BPNT

langsung memasukan data jika data tersebut benar maka valid, namun jika tidak valid maka kita harus menindaklanjuti ke Dukcapil. Sedangkan yang kartunya hilang harus melakukan penggantian kartu sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai Pedoman Umum BPNT. Jadi untuk penerima bantuan yang ada kendala pada kartu dan datanya perlu diperbaiki untuk sementara bantuannya *dipending*.

## **B. Saran**

1. Bagi pemilik E-Warong di Desa Tambong dengan terbatasnya jumlah E-Warong di Desa Tambong diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa terkecuali agar hak KPM terpenuhi dan pendistribusian efektif berjalan lancar.
2. Bagi pemerintah Desa Tambong hendaknya melakukan sosialisasi kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan BPNT, dan juga memberikan edukasi pada E-Warong agar melaksanakan pengawasan komoditas pangan yang dapat dibeli oleh KPM.
3. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan BPNT ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dari BPNT ini bisa dicapai dengan baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan cara memuat data yang lebih banyak dengan jumlah informan yang lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Lukman. 2014. *Kinerja Ekonomi Pangan Nasional: Dinamika dan Reformasi Kebijakan*. Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2020*, Jakarta: BPS.
- Belawane, Muhammad. 2020. *Kelembagaan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI
- Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewi, Fitroh Amalika. 2019. *Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Kendal (Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh Tahun 2018)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Ding, Dimianus. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pemerintah. Vol. 02
- Fakni, Kardila. 2018. *Fungsi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang*, Skripsi, SumBar: STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Gumbira, Farah Reina 2019. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*, Skripsi, Padang: Universitas Andalas Padang.
- Hidayat, Yusup Rachmat. 2018. *Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai*. Jurnal Logistik Indonesia. 2. 2.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Edisi Pertama)*. Depok: Kencana.
- Ilham, Nyak dan I Wayan Rusastra. 2009. *Daya Saing Komoditas Pertanian: Konsep, Kinerja dan Kebijakan Pengembangan*. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian.

- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran.
- Madur, Jef. 2001. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muin, Rahmawati. 2013. *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Makasar: UIN Alauddin Makasar, Vol. 3 No. 1.
- Muslim, M. Hidayat Panuntun. 2019. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 2 No. 1.
- Mustafida, Nunung Ifanatul. 2019. *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karangharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi, Jember: Universitas Negeri Jember.
- Mustikasari. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2018*, Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nisa, Ahda Sulukin. 2019. *Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natae Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Nurkhotijah, Ade. 2018. *Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Grogol Kota Cilegon Banten*, Skripsi, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Pantu, Sri Dewi Sasmita. 2019. *Analisis Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo*, Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK)*. Lembar Negara RI Tahun 2013 No. 03. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai*. Lembar Negara RI Tahun 2018 No. 11. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Rosalina, Iga. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetan*, Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 01.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sensus Penduduk 2020 No. 02/01/3510/Th.XIX/21 Januari 2021.
- Sudaryono. 2016. *Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Berbagi Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. 2019. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai*. Jakarta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wiwit. 2020. *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : FAHRINA AMALIA  
Tempat, Tanggal lahir : BANYUWANGI, 01 - MEI - 1998  
NIM : E20172184  
Fakultas / Prodi : FEBI / Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Kejoyo Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten  
Banyuwangi

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "*Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong Di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*" adalah benar-benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

JEMBER, 19 November 2021

Mahasiswa



FAHRINA AMALIA

NIM : E20172184

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong Di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi	1. Efektivitas Pola distribusi  2. Bantuan Pangan Non Tunai  3. E-Warong	a. Tepat sasaran b. Tepat waktu c. Tepat harga d. Tepat jumlah e. Tepat kualitas f. Tepat administrasi  a. Tujuan BPNT b. Instrument pembayaran BPNT  a. Kriteria E-Warong b. Fungsi E-Warong.	Informan 1. Kepala Desa Tambong 2. Kesra Desa Tambong 3. Pendamping BPNT 4. Pemilik E-Warong 5. Penerima BPNT	1. Pendekatan kualitatif 2. Jenis deskriptif 3. Teknik penentuan subjek penelitian, Teknik <i>purposive</i> dan <i>snowball</i> 4. Lokasi Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi 5. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik Analisa data deskriptif kualitatif 7. Keabsahan data triangulasi sumber	1. Bagaimana efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi? 2. Apa saja kendala efektivitas pola distribusi Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong Di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi? 3. Bagaimana solusi kendala pola distribusi bantuan pangan non tunai melalui E-warong di desa tambong kecamatan kabat kabupaten banyuwangi?



## Pedoman Wawancara

1. Untuk Kepala Desa
  - a. Apakah di Desa Tambong ada Bantuan Pangan Non Tunai?
  - b. Kapan bantuan tersebut didistribusikan?
  - c. Dimana tempat pencairan Bantuan Pangan Non Tunai?
  - d. Ada berapa E-Warong di Desa Tambong?
  - e. Apakah bantuan didistribusikan secara transparan?
  - f. Akah bantuan didistribusikan sesuai dengan pedoman penyaluran?
2. Untuk Pendamping BPNT
  - a. Ada berapa macam program Bantuan Pangan Non Tunai?
  - b. Apa tugas pendamping Bantuan Pangan Non Tunai?
  - c. Apakah Bantuan Pangan Non Tunai didistribusikan sesuai pedoman?
  - d. Bagaimana jika ada penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang kartunya bermasalah atau hilang?
  - e. Apa saja kendala pada program Bantuan Pangan Non Tunai?
3. Untuk pemilik E-Warong
  - a. Ada berapa E-Warong di Desa Tambong?
  - b. Kapan Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan?
  - c. Apasaja yang diperoleh oleh Keluarga Penerima Manfaat?
  - d. Apakah ada biaya tambahan untuk mengambil bantuan tersebut?
  - e. Apa ada Keluarga Penerima Manfaat yang awalnya mendapatkan bantuan tapi bulan berikutnya tidak mendapatkan bantuan?
  - f. Apasaja kendala yang terjadi pada saat pendistribusian berlangsung?
4. Untuk Kesra Desa
  - a. Mengapa ada masyarakat yang bantuannya terputus?
  - b. Bagaimana cara mengatasi Keluarga Penerima Manfaat yang datanya bermasalah?
  - c. Apa kekurangan dan kelebihan dari Bantuan Pangan Non Tunai?
5. Untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai
  - a. Bagaimana proses mengambil bantuan tersebut?
  - b. Setiap bulannya mendapatkan bantuan dalam bentuk apa?
  - c. Apakah bantuan ini membantuan ibu?







PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN KABAT  
**KANTOR DESA TAMBONG**

Jalan Licin No. 001 Desa Tambong Email: desatambong@gmail.com Kode Pos: 68461

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 /132/429.506.14/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ABDUL BASIS**  
Jabatan : Sekretaris Desa  
Alamat : Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi .

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Fahrina Amalia  
Nim : E20172184  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah  
Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong Di Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”.

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 11 November 2021

Sekretaris Desa Tambong

ABDUL BASIS





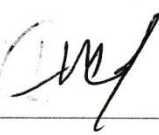

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Fahrina Amalia

Nim : E20172184

Judul : Efektivitas Pola Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warong Di  
Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

Lokasi : Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	1 November 2021	Menyerahkan surat ijin penelitian sekaligus wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, S. Sos selaku Kepala Desa Tambong	
2.	1 November 2021	Melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Mugis .	
3.	1 November 2021	Melakukan wawancara dengan Bapak Karsono	
4.	2 November 2021	Melakukan wawancara dengan Ibu Norma selaku pemilik E-Warong	
5.	2 November 2021	Melakukan wawancara dengan Ibu Istiharoh	
6.	2 November 2021	Melakukan wawancara dengan Ibu Masitah	

## DOKUMENTASI













## BIODATA



Nama : Fahrina Amalia

NIM : E20172184

Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Mei 1998

Alamat : Desa Tambong Dusun Kejoyo rt 002 rw 005 Kecamatan Kabat  
Kabupaten Banyuwangi

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan : TK Yos Sudarso  
SDN Tambong  
MTs Miftahul Mubtadiin  
SMAN Darussholah Singojuruh